



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Laporan Kinerja

Triwulan I
2024



Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama 3 bulan di tahun 2024. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan kedua tahun 2024.



Jakarta, April 2024

Deputy Director of Maritime and Energy Coordination



Jodi Mahardi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2024.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang akan dihitung pada akhir tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023). Ketiga Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tersebut dibagi dalam 4 Perspektif, yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SS.1 yang memiliki 3 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut: **1) Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan dukungan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Pertama tersebut Asisten Deputi Energi melaksanakan sebanyak 9 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan pelaksanaan 2**




kegiatan di tunda pada triwulan II tahun 2024; 2). Nilai Kedaulatan Maritim berdasarkan perhitungan dari Nilai Variabel kewilayahan maritim, Variabel Keselamatan Maritim serta Variabel keamanan dan ketahanan maritim. **Nilai Variabel kewilayahan maritim yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan** melalui 8 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 3 kegiatan di tunda pada triwulan II tahun 2024, Untuk Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan 10 Indonesia Melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024, berdasarkan Renaksi harus dijalankan pada triwulan II tapi sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. **Nilai Keselamatan Maritim yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim** melalui 10 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 2 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 tetapi dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024. **Nilai tingkat keamanan dan ketahanan maritim dilaksanakan oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim** melalui 7 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 11 kegiatan ditunda pada triwulan II tahun 2024. 3) **Efektivitas Diplomasi Maritim dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim** melalui 5 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 5 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 tetapi dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024. Khusus Kegiatan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Uzbekistan tidak dilanjutkan, sebab sudah dilakukan identifikasi dan menghasilkan bahwa kerja sama tersebut tidak mendapatkan potensial yang baik bagi Pemerintah Indonesia. Sedangkan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Korea di tunda pelaksanaannya di triwulan III tahun 2024. Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi triwulan I tahun 2024 yang belum dilaksanakan, karena penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bapak menko. Untuk itu maka direkomendasikan kepada unit eselon II agar merevisi renaksinya sehingga penyelesaian renaksi ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya

Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut: **4) Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, dimana terdiri dari 6 rancangan kebijakan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I Tahun**



2024 antara lain; a). Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan beberapa Negara (Inggris dan Amerika Serikat).; b). Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Pertemuan 2nd IORIS Steering Committee Meeting di Colombo, Sri Lanka.; c). Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penyusunan Permenko Marves terkait Pembentukan Tim Koordinasi sesuai Mandat Perpres 80/2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI); d). Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Persiapan Kelanjutan Kontribusi Indonesia untuk AIS Forum dan Koordinasi Kickoff Rencana Kerja Sekretariat AIS Forum Tahun 2024.; e). Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Lanjutan Persiapan Substantif Public-Private Forum Dialog Shipping Related Matters; 2). Koordinasi Identifikasi Potensi Jasa Maritim di Kepulauan Riau; 3). Koordinasi Public-Private Forum Dialog on Shipping Related Matters; 4). Koordinasi Percepatan Perizinan dan Operasi Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPKL) dan PT Layan Nusantara Gas (PTLNG); f). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Migas Dan Hilirisasi Industri Migas; 2). Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR)); 3). Koordinasi penerbitan regulasi dalam rangka penurunan emisi GRK sektor migas; 4). Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 10 Kota..


Sedangkan Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 untuk IKU 5). Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, dengan realisasi sebesar 100%, dimana Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan terdiri dari 3 Isu Strategis yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I Tahun 2024 antara lain; a). Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Penyusunan Suggested Points of



Interventions BMD ke 2 RI Prancis; 2). Koordinasi BMD ke 2 RI Prancis; 3). Koordinasi interkem persiapan FGD UUV; 4). Koordinasi JTC on Mining di Kenya; 5). Koordinasi Task Force Percepatan Kerja Sama Indonesia-Mozambik; **b). Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi** melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Proses Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura tentang FIR, DCA, dan Ekstradisi; 2). Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembiayaan Personel CMAC di SATCC pada K/L terkait; 3). Penyampaian Rekomendasi Penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) Indonesia-Singapura pada Direktur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama Perum, LPPNPI/Airnav.; **c). Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum)** melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah secara umum proses koordinasi antar KL untuk tindak lanjut amanat kepala negara telah disepakati untuk melalui 2 strategi utama yaitu: Penyusunan regulasi nasional yang mencakup roadmap pembentukan AIS Forum sebagai OI sekaligus penguatan tim koordinasi di tingkat nasional Perlu komunikasi formal dengan negara-negara AIS terkait roadmap yang telah coba disusun oleh tim koordinasi nasional melalui technical meeting/SOM/MM.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk **IKU 6) Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi** realisasi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Sosialisasi dan Asistensi SKP Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Finalisasi RB Tematik; 3). Koordinasi Penyusunan Laporan TU Persuratan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Bulan Januari-Maret 2024; 4). Koordinasi Dalam rangka tata tertib administrasi pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah memfasilitasi sosialisasi dan asistensi tata cara pengisian kedua laporan tersebut.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk **IKU 7) Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi** realisasi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Penyusunan Manual IKU dan Rencana Aksi tahun 2024; 3) Koordinasi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024; 4) Koordinasi Perubahan POK Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan



Energi tahun 2024; 5) Koordinasi Penyusunan . Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA. 2024 telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP 120.01.1.350494/2024 tanggal 24 November 2023 dimana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memperoleh alokasi **Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp 46.230.000.000,-** dengan blokir anggaran. Blokir anggaran dilakukan karena rencana kerja tidak dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada TA. 2024 terdapat alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp3.118.540.000,-. **Berdasarkan No: 19/MARVES/SESMENKO/ND/2024 Hal. Penyampaian Distribusi Blokir Automatic Adjustment Kemenko Marves TA 2024.** Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2024 karena mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2024

Capaian Kinerja Keuangan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp.3,363,733,520,- (7,80%) dari total Anggaran sebesar Rp.43,111,460,000,-. Tingkat Realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 sebesar 7,80% dikarenakan adanya Perjanjian Pendanaan Pemri untuk AIS Forum (Kontribusi Sukarela Non-reguler) anggaran dalam RO atau Kegiatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar Rp.22.000.000.000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Maksud dan Tujuan.....	9
1.3. Peran Strategis	13
1.4. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
2.4. Pengukuran Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	30
3.2. <i>Ultimate Outcome</i> (SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien).....	33
3.2.1. <i>IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi</i>	34
3.2.2. <i>IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim</i>	36
3.2.3. <i>IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim</i>	42
3.3. <i>Intermediate Outcome</i> (SS.2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi).....	44
3.3.1. <i>IKU 4: Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti</i>	46
3.3.1.1 <i>Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi</i>	47
3.3.1.2 <i>Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi</i>	48
3.3.1.3 <i>Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional</i>	49

3.3.1.4 Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum).....	52
3.3.1.5. Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional.....	53
3.3.1.6. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.....	54
3.3.2. IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan.....	56
3.3.2.1 Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration.....	57
3.3.2.2 Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi.....	59
3.3.2.3 Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum).....	61
3.4. Immediate Outcome (SS.3. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi).....	62
3.4.1. IKU 6: Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	63
3.4.2. IKU 7: Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	64
3.5. Analisa Keuangan.....	67
3.6. Analisa Sumber Daya.....	74
3.6.1. Pegawai.....	74
3.6.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW).....	79
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Kendala.....	84
4.4. Tindak Lanjut.....	87
LAMPIRAN.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran atau target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2024 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada Triwulan II Tahun 2024 dalam substansi yang terkait.

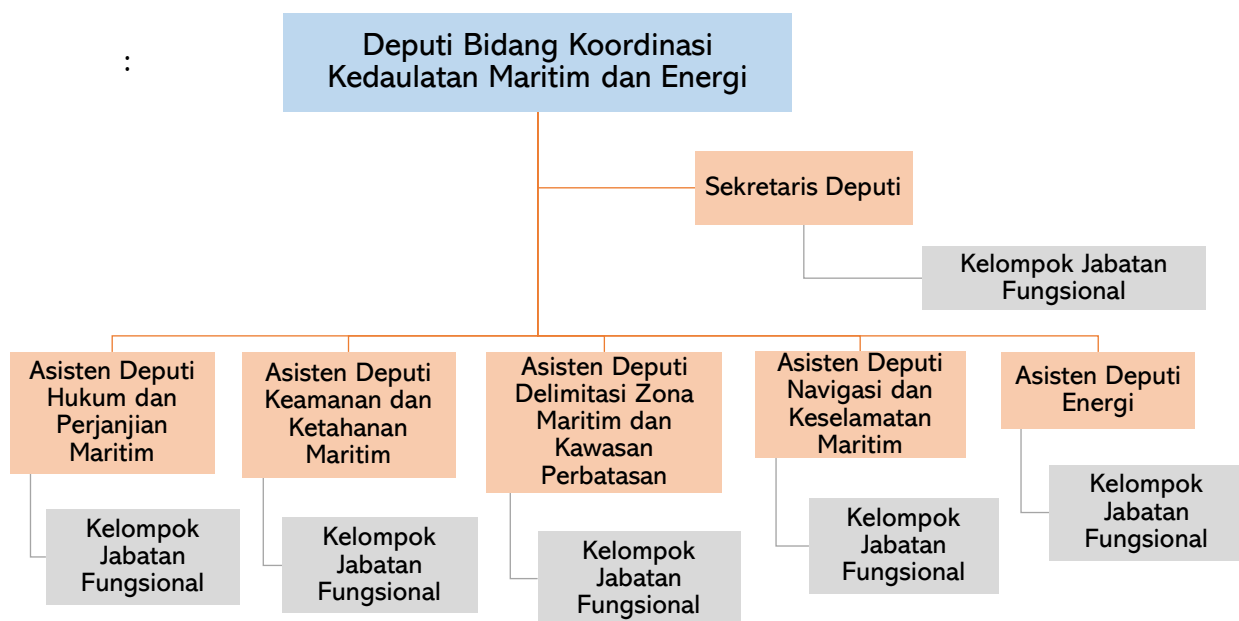
1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 10 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di



	keamanan dan ketahanan maritim	bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan




		c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.3. Peran Strategis

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode jangka menengah. Agenda pembangunan kemaritiman dan investasi tahun 2020-2024 khususnya pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yaitu Teguhnya Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

Pelaksanaan tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Tujuan peran strategis tersebut adalah terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global dan terwujudnya ketahanan energi nasional.



Dalam kerangka pemenuhan tujuan peran strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kedaulatan maritim dan energi, maka Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi fokus pada 5 program prioritas yaitu bidang hukum dan perjanjian maritim, bidang keamanan dan ketahanan maritim, bidang kewilayahan maritim, bidang keselamatan maritim dan bidang ketahanan energi.

1.4. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai Triwulan I Tahun 2024 total berjumlah 63 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 55 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 8 orang. Jumlah PNS yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang. Sedangkan jumlah TKK yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang.

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.3. Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp1.758.791.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp10.710.496.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp27.167.997.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp1.884.294.000
5	Koordinasi Energi	Rp1.710.422.000
6	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp800.000.000
7	Dukungan Manajemen Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp2.200.000.000
Jumlah Anggaran		Rp 46.230.000.000


1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diuraikan realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja tahun 2023, kegiatan tahun 2023 penghitungan pencapaian IKU unit kerja, Data dukung lainnya terhadap pencapaian IKU.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan investasi tahun 2020-2024 khususnya pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yaitu Teguhnya Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

Oleh karena itu visi Tahun 2020-2024 Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi adalah mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim
2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia
3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia
		4	Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia
		5	Meningkatnya Kemandirian dan ketahanan energi

Memperhatikan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020 dan 2021, bahwa rendahnya tingkat kendali Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terhadap beberapa IKU serta rendahnya kontinuitas ketersediaan data untuk beberapa IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi perlu dilakukan penajaman. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah melakukan reviu Renstra untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Reviu dilakukan sampai pada level Eselon II.

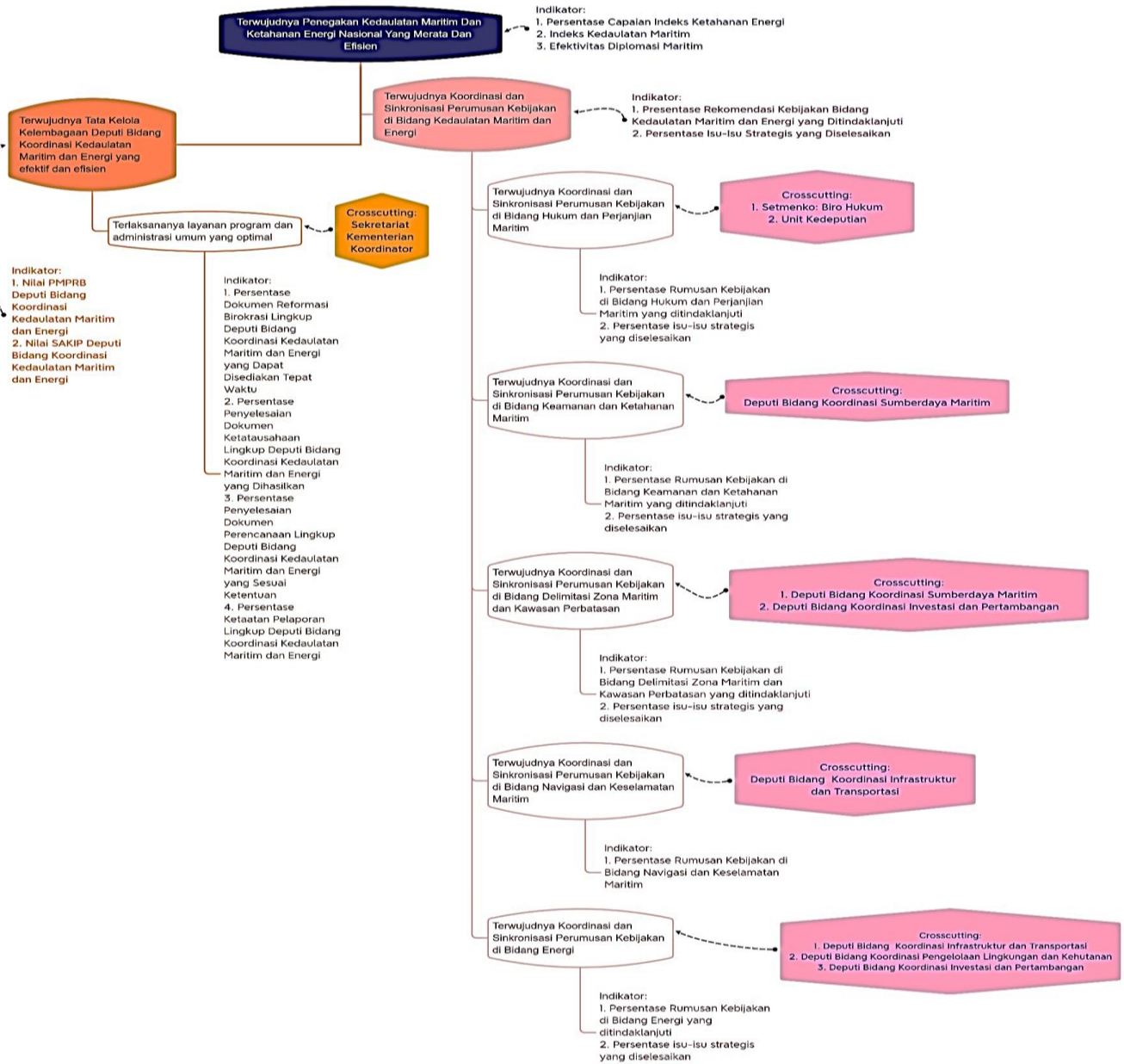
Hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya.

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan mencari cara untuk

meningkatkan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Cascading Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terbagi ke dalam 3 (tiga) leveling outcome, yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Kinerja tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk masing-masing *leveling outcome* dengan 1 (satu) sasaran. *Ultimate outcome* melalui 1 (satu) sasaran strategis, *Immediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran strategis; serta *Intermediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2023-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	2023			2024			TARGET RRENSTRA 2024	
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
Ultimate Outcome					110,97%	Ultimate Outcome			
SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5%	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	70%
		2	Indeks Kedaulatan Maritim	70	78,30	2	Indeks Kedaulatan Maritim	79	79
		3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70	75,30	3	Efektivitas Diplomasi Maritim	76	76
Immediate Outcome					100%	Immediate Outcome			
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	70%
		5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%
Intermediate Outcome					104,79%	Intermediate Outcome			
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	6	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	N/A*
		7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	N/A*
Output					100%	Output			



	Jumlah Target Output pada Renja 2023 <ul style="list-style-type: none">• 18 Rekomendasi Kebijakan• 2 Layanan Kesekretariatan 4 Dokumen Perencanaan 16 Dokumen Pelaporan	100%		Jumlah Target Output pada Renja 2024 <ul style="list-style-type: none">• 18 Rekomendasi Kebijakan• 2 Layanan Kesekretariatan 4 Dokumen Perencanaan 16 Dokumen Pelaporan	100%	
--	--	------	--	--	------	--

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves



2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2024 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 5 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim
2. Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim
3. Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim
4. Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim
5. Koordinasi Energi.

Penyusunan anggaran Triwulan I Tahun 2024, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA. 2024 telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP 120.01.1.350494/2024 tanggal 24 November 2023 dimana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memperoleh alokasi **Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp 46.230.000.000,-** dengan blokir anggaran. Blokir anggaran dilakukan karena rencana kerja tidak dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada TA. 2024 terdapat alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp3.118.540.000,-. **Berdasarkan No: 19/MARVES/SESMENKO/ND/2024 Hal. Penyampaian Distribusi Blokir Automatic Adjustment Kemenko Marves TA 2024.** Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2024 karena mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2024. Adapun rincian alokasi Automatic Adjustment sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Sampai Akhir Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Blokir Anggaran	Anggaran Yang Dapat Digunakan
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp1.758.791.000	Rp248.690.000	Rp1.510.101.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp10.710.496.000	Rp1.516.165.000	Rp9.194.331.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp27.167.997.000	Rp309.938.000	Rp26.858.059.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp1.884.294.000	Rp490.193.000	Rp1.394.101.000
5	Koordinasi Energi	Rp1.710.422.000	Rp242.125.000	Rp1.468.297.000
6	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp800.000.000	0	Rp800.000.000
7	Dukungan Manajemen Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp2.200.000.000	Rp311.429.000	Rp1.888.571.000
Jumlah Anggaran		Rp46.230.000.000	Rp3.118.540.000	Rp43.113.460.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi maka menghasilkan perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024, sebagai alat untuk mengukur kinerja ke deputian selama satu tahun. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kedaulatan Maritim	79	Tahunan
	Efektivitas Diplomasi Maritim	76	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	Tahunan
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	Tahunan

Adapun Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Target				
			2024	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	-	-	-	100%
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim	79	-	-	-	79
3	Indeks Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim	76	-	-	-	76
4	Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	100%	25%	50%	75%	100%
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi	100%	25%	50%	75%	100%
		3. Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	100%	25%	50%	75%	100%
		4. Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	25%	50%	75%	100%
		5. Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	100%	25%	50%	75%	100%
		6. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	25%	50%	75%	100%
5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Direktif Presiden/Pimpinan Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration	100%	25%	50%	75%	100%
		2. Direktif Presiden/Pimpinan Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi	100%	25%	50%	75%	100%
		3. Direktif Presiden/Pimpinan Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut <i>leaders declaration</i> AIS Forum)	100%	25%	50%	75%	100%
6	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	-	-	-	85
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	-	-	-	76

Sedangkan Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2024
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7.92	Inderect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3	Inderect		Indeks Kedaulatan Maritim	79	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	76	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemandirian dan Investasi yang Efektif dan Efisien	Presentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	85,1	Inderect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	Tahunan

Sumber. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024

2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun anggaran 2024 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja tersebut diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia pada akhir tahun anggaran 2024 .

Berdasarkan hasil reviu Renstra sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 dan 2021, maka mempengaruhi perubahan formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen **Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Formulasi pada dokumen manual IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, berdasarkan Buku Manual: Kepemimpinan Maritim (2023), seperti pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Cover Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim



Level Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi :

Indikator Kinerja 1:

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penggunaan energi yang ramah lingkungan (acceptability), dan ketersediaan energi (availability). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga

mempertimbangkan jenis energi yang yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dihitung menggunakan formula.

$$\text{Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi} = \frac{\text{Indeks Ketahanan Energi}}{\text{Target Indeks Ketahanan Energi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 2:

Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim. Indeks Kedaulatan Maritim dihitung menggunakan formula.

$$IKedM = W_{ISM}I_{ISM} + W_{IWM}I_{IWM} + W_{IAM}I_{IAM}$$

Keterangan:

W_{ISM} : bobot untuk variable keselamatan maritim

I_{ISM} : nilai skor untuk variable keselamatan maritim

W_{IWM} : bobot untuk variable kewilayahan maritim

I_{IWM} : nilai skor untuk variable kewilayahan maritim

W_{IAM} : bobot untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

I_{IAM} : nilai skor untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{ISM} , W_{IWM} , dan W_{IAM} secara berurutan yakni 11, 24, dan 65.

Indikator Kinerja 3:

Indeks Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Indeks diplomasi maritim tersusun dari dua variabel, dengan menggunakan formula.

$$IDiplomMar = W_{IDia}I_{IDia} + W_{IMisi}I_{IMisi}$$

Keterangan:

W_{IDia} : bobot untuk variabel dialog

I_{IDia} : nilai skor untuk variabel dialog

W_{IMisi} : bobot untuk variabel misi

I_{IWM} : nilai skor untuk variabel misi

Adapun nilai bobot untuk W_{IDia} dan W_{IMisi} yakni 39 dan 61.

Indikator Kinerja 4:

Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi terukur dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan menggunakan formula.

$$\text{Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L}}{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 5:

Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi. Capaian Indikator Kinerja 5 terukur dari jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja 6:

Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Indikator Kinerja 7:

Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan *logical framework* yang sebelumnya menggunakan *Balanced Scorecard*.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2024. Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023) akan dihitung pada akhir tahun anggaran 2024, sedangkan realisasi Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Triwulan I tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Target RPJMN/Nasional	
		Target	Realisasi Triwulan I			Target	Realisasi			2023	2024
Ultimate Outcome					Ultimate Outcome						
Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	-	-	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5	113,50 %	100%	N/A*	N/A*
	Indeks Kedaulatan Maritim	79 ≈ 3 (Berdaulat)	-	-	Indeks Kedaulatan Maritim	70% ≈ 3 (Berdaulat)	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	111,86 %	70% ≈ 3 (Berdaulat)	N/A*	N/A*
	Efektivitas Diplomasi Maritim	76	-	-	Efektivitas Diplomasi Maritim	70%	76,65%	107,57 %	70%	N/A*	N/A*
Immediate Outcome					Immediate Outcome						
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	25%	25%	Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
	Presentase Isu-lsu Strategis yang Diselesaikan	100%	25%	25%	Presentase Isu-lsu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
Intermediate Outcome					Intermediate Outcome						
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi	Nilai PMPRZI Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	-	-	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	100%	95	N/A*	N/A*



Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	-	-	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79 %	N/A***	N/A*	N/A*
Output					Output						
Jumlah Target Output pada Renja Triwulan I Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> • 18 Policy Kebijakan • 2 Layanan Kesekretariatan <ul style="list-style-type: none"> • 1 Dokumen Perencanaan • 7 Dokumen Pelaporan 					Jumlah Target Output pada Renja 2023 <ul style="list-style-type: none"> • 18 Rekomendasi Kebijakan • 2 Layanan Kesekretariatan <ul style="list-style-type: none"> • 4 Dokumen Perencanaan • 16 Dokumen Pelaporan 						

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

***) Hasil tahun 2022

****) tidak ada target pada dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Sehingga capaian kinerja total Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2024 melalui pendekatan perspektif dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Pada Akhir Tahun 2024 Berdasarkan Pendekatan Perspektif dan Bobot

Perspektif	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif

3.2. *Ultimate Outcome* (SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien)

Ultimate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis pertama (SS.1) pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, yang terdiri dari tiga IKU, yaitu Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, Indeks Kedaulatan Maritim dan Efektivitas Diplomasi Maritim. Perspektif *Ultimate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,4. Capaian Kinerja *Ultimate Outcome* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang dihitung pada akhir tahun 2024. Adapun IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang termasuk dalam *Ultimate Outcome* sebagai berikut.

Tabel 3.4. Ultimate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%
2	Indeks Kedaulatan Maritim	79
3	Efektivitas Diplomasi Maritim	76

Defenisi SS.1 adalah suatu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur kedaulatan maritim dan ketahanan energi. Unsur kedaulatan maritim yang terdiri dari aspek kewilayahan, keamanan dan ketahanan maritim, dan keselamatan maritim. Sedangkan unsur ketahanan energi terdiri atas aspek terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sasaran strategis

ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Adapun capaian kinerja SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien dari tahun 2020 sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	6-7,99	7,04	7,19	7,18	113,5 %	100%	100%
Kedaulatan Maritim	70	62,10 % ≈ 3 (Berdaulat)	70,50 % ≈ 3 (Berdaulat)	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	79	79
Efektivitas Diplomasi Maritim	70	60,70%	61,54%	76,65%	75,80	76	76

3.2.1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Defenisi Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi akan dihitung pada akhir tahun 2024. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi diperoleh berdasarkan Nilai Indeks Ketahanan Energi dibagi Target Indeks Ketahanan Energi dan dikali seratus persen, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi} = \frac{\text{Indeks Ketahanan Energi}}{\text{Target Indeks Ketahanan Energi}} \times 100\%$$

Adapun perbandingan persentase capaian indeks ketahanan energi dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi Dari Tahun 2020 Sampai 2023

Uraian	Target 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	6-7,99	7,04	7,19	7,18	113,5 %	100%	100%

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung SS 1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi pada Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7. dibawah ini.

. Tabel 3.7. kegiatan-kegiatan yang mendukung SS 1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi pada Triwulan I Tahun 2024 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	1	Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Migas Dan Hilirisasi Industri Migas
	2	Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR))
	3	Koordinasi penerbitan regulasi dalam rangka penurunan emisi GRK sektor migas
	4	Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 10 Kota,
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	5	Koordinasi dan Monitoring Progres Proyek PSEL Kota Tangerang
	6	Koordinasi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
	7	Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Pembangkit EBT Tahun 2023 dan Investasi di Sektor EBT Tahun 2024
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional	8	Koordinasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi di Indonesia
	9	Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketanagalistrikan melalui tiga sektor yakni, pembangkitan, transmisi, dan pembangunan gardu induk

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang tertunda pada Triwulan I dan akan dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2024 dalam mendukung SS 1. IKU 1. dapat dilihat pada Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8. Kegiatan-Kegiatan yang tertunda pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam mendukung SS 1. IKU 1

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	1	Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	2	Koordinasi dan Monitoring Progres Proyek PSEL Kota Palembang

3.2.2. IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim

Defenisi Indeks Kedaulatan Maritim merupakan Indeks pertama dalam penyusunan Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indeks Kedaulatan Maritim menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim, dengan formula sebagai berikut.

$$IKedM = W_{ISM}I_{ISM} + W_{IWM}I_{IWM} + W_{IAM}I_{IAM}$$

Keterangan:

W_{ISM} : bobot untuk variable keselamatan maritim

I_{ISM} : nilai skor untuk variable keselamatan maritim

W_{IWM} : bobot untuk variable kewilayahan maritim

I_{IWM} : nilai skor untuk variable kewilayahan maritim

W_{IAM} : bobot untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

I_{IAM} : nilai skor untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{ISM} , W_{IWM} , dan W_{IAM} secara berurutan yakni 11, 24, dan 65.

Adapun perbandingan capaian Nilai Indeks Kedaulatan Maritim dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Nilai Indeks Kedaulatan Maritim Dari Tahun 2020 Sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022 Realisasi	2023 Realisasi	Target 2024	Target Renstra 2024
Kedaulatan Maritim	70	62,10 % ≈ 3 (Berdaulat)	70,50 % ≈ 3 (Berdaulat)	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	79	79

Capaian Indeks Kedaulatan Maritim berdasarkan penjumlahan antara Variabel Keselamatan Maritim, Variabel Kewilayahan Maritim serta Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim. Indikator pada variable Kewilayahan adalah Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan, Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional, Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun. Indikator pada variable Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah Indeks Keamanan Laut dan Tingkat Kendali Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim. Sedangkan Indikator pada variable Keselamatan Maritim adalah Tingkat Keselamatan Maritim.

➤ Kewilayahan Maritim

Variabel kewilayahan maritim tersusun atas 4 indikator utama yakni: 1) persentase posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional (**sumber data Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan**); 2) indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim (**sumber data Kementerian Luar Negeri**); 3) realisasi jumlah dokumen kesepakatan teknis batas negara di laut yang tersusun (**sumber data dari Badan Informasi Geospasial**); 4) presentasi zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan (**sumber data Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan**), dengan capaian variabel kewilayahan maritim yang akan dihasilkan pada akhir tahun 2024.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Variabel Kewilayahan Maritim pada Triwulan I tahun 2024 dilaksanakan oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dapat dilihat dibawah ini.

Adapun kegiatan-kegiatan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.11. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan yang Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim pada Triwulan I tahun 2024

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi	1	Koordinasi Perkembangan Penyusunan Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perairan Pedalaman
	2	Monitoring hasil updating progress penelaahan, verifikasi, dan validasi sejumlah pulau di Indonesia

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim	3	Koordinasi Review Proses Penetapan Zona Maritim di Indonesia
	4	Koordinasi Percepatan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan 10 Indonesia Melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024
	5	Koordinasi Percepatan Pemberlakuan Secara Simultan Persetujuan FIR 2022, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007, dan Perjanjian Ekstradisi 2022 Pada Semester 1 Tahun 2024
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	6	Koordinasi Penyusunan Permenko Marves terkait Pembentukan Tim Koordinasi sesuai Mandat Perpres 80/2023 tentang Peran Aktif Indonesia di KDLI
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	7	Koordinasi Persiapan Kelanjutan Kontribusi Indonesia untuk AIS Forum
	8	Koordinasi Kickoff Rencana Kerja Sekretariat AIS Forum Tahun 2024

Untuk Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan 10 Indonesia Melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024, berdasarkan Renaksi harus dijalankan pada triwulan II tapi sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Sedangkan kegiatan-kegiatan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi	1	Koordinasi Rencana Penyelenggaraan Nama Rupabumi Fitur Bawah Laut
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia	2	Koordinasi Kickoff Persiapan Ratifikasi Perjanjian BBNJ oleh Indonesia

dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	3	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan National Consultation / Diseminasi Perjanjian BBNK kepada stakeholder nasional
---	---	---

➤ Keselamatan Maritim

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim (**sumber data Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim**). Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu, keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat Keselamatan Maritim diukur dalam rentang nilai 0 s.d. 100 persen dengan formula sebagai berikut.

$$KM = \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3}$$

dimana:

KM = Tingkat Keselamatan Maritim

$\%B1$ = Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran | $0\% \leq \%B1 \leq 100\%$

$\%B2$ = Tingkat Keselamatan Aktivitas Pelayaran | $0\% \leq \%B2 \leq 100\%$

$\%B3$ = Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim | $0\% \leq \%B3 \leq 100\%$

Nilai variabel keselamatan maritim akan dihasilkan pada akhir tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Variabel tersebut pada Triwulan I tahun 2024 dilaksanakan oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim dapat dilihat pada Tabel 3.13. dibawah ini.

Tabel 3.13. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim yang Mendukung Variabel Keselamatan Maritim pada Triwulan I tahun 2024

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan International	1	Koordinasi Lanjutan Persiapan Substantif Public-Private Forum Dialog Shipping Related Matters
	2	Koordinasi Identifikasi Potensi Jasa Maritim di Kepulauan Riau
	3	Koordinasi Public-Private Forum Dialog on Shipping Related Metters
	4	Koordinasi Percepatan Perizinan dan Operasi Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPKL) dan PT Layar Nusantara Gas (PTLNG)

Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim	5	Koordinasi pengajuan hibah Rig Reutilization tindak lanjut kerja sama RI Korea
	6	Koordinasi pengajuan hibah Official Development Assistance tindak lanjut kerja sama RI Korea
	7	Koordinasi Identifikasi perizinan Rig to Reef In Situ Ruby Platform
	8	Koordinasi Pembentukan Task Force Tindaklanjut Kerjasama RI-Korea
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Kecelakaan Maritim	9	Koordinasi Penanganan MV Grand Sunny di China
	10	Koordinasi pengusulan Proyek peningkatan produksi LNG di Papua Barat sebagai Proyek Strategis Nasional

Sedangkan kegiatan-kegiatan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Keselamatan Maritim, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Keselamatan Maritim

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Kecelakaan Maritim	1	Koordinasi Identifikasi Bahaya pada Segmen Laut Sawu
	2	Koordinasi Pemetaan Masalah yang dihadapi Mahkamah Pelayaran dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Mahkamah Pelayaran

➤ **Keamanan dan Ketahanan Maritim**

Variabel ini tersusun dari dua indikator utama, yakni: 1) tingkat keamanan dan ketahanan maritim (**sumber data Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim**) dan 2) indeks keamanan laut (**sumber data Badan Keamanan Laut**). Nilai Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim akan dihasilkan pada akhir tahun 2024.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim pada Triwulan I tahun 2024 dilaksanakan oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim dapat dilihat pada Tabel 3.15. dibawah ini.

Tabel 3.15. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim yang Mendukung Variabel Keselamatan Maritim pada Triwulan I tahun 2024

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	1	Koordinasi Pertemuan 2nd IORIS Steering Committee Meeting di Colombo, Sri Lanka.
Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	2	Koordinasi Percepatan Terbitnya Turunan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran melalui Maritime Law Enforcement Dialogue ke-14th dan Prosecutors Network on Maritime Enforcement (PNME) Meeting di Langkawi, Malaysia
Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Internasional: GSC/EEC	3	Koordinasi Penyusunan Suggested Points of Interventions BMD ke 2 RI Prancis
	4	Koordinasi BMD ke 2 RI Prancis
	5	Koordinasi interkem persiapan FGD UUV
	6	Koordinasi JTC on Mining di Kenya;
	7	Koordinasi Task Force Percepatan Kerja Sama Indonesia-Mozambik

Sedangkan kegiatan-kegiatan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Keselamatan Maritim

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	1	Koordinasi untuk memberikan pelatihan operasional API Hub dan Dashboard Analytics bagi operator dan analis K/L terkait (Tahap Pemula)
	2	Koordinasi Penyusunan SOP Pemeriksaan Kapal Oleh Tim Teknis
	3	Koordinasi Dukungan konfigurasi API Hub dan Dashboard Analytics di masing-masing K/L
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	4	Koordinasi Persiapan Penyusunan Kerpos.
	5	Koordinasi Bilateral Maritime Forum ke-2 RI-Perancis
Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	6	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Workshop pemanfaatan dan optimalisasi peran Masyarakat dan pemda dalam pengawasan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Nagekeo.
	7	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan FGD dan TTX Search and Rescue in Outermost Island Kerja Sama dengan Pemerintah Perancis
	8	Koordinasi dan Konsolidasi pembangunan Kab. Simelue

Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	9	Konsolidasi Awal dengan Tim 9 terkait Pembentukan Tim Nasional Akses Konvensi ILO C188.
	10	Koordinasi Penyusunan draft SK Tim Nasional Percepatan Akses Konvensi ILO C188
Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Internasional: GSC/EEC	11	Koordinasi dengan BUMN dan Private Sector untuk Persiapan Pertemuan dengan UNHQ

Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi triwulan I tahun 2024 yang belum dilaksanakan, karena penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bapak menko. Untuk itu maka direkomendasikan kepada unit eselon II agar merevisi renaksinya sehingga penyelesaian renaksi ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya

3.2.3. IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim

Definisi Indeks Efektivitas Diplomasi Maritim merupakan Indeks kedua dalam penyusunan Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Indikator Efektivitas Diplomasi Maritim menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional, dengan formula sebagai berikut.

$$IDiplomMar = W_{IDia}I_{IDia} + W_{IMisi}I_{IMisi}$$

Keterangan:

W_{IDia} : bobot untuk variabel dialog

I_{IDia} : nilai skor untuk variabel dialog

W_{IMisi} : bobot untuk variabel misi

I_{IWM} : nilai skor untuk variabel misi

Adapun nilai bobot untuk W_{IDia} dan W_{IMisi} yakni 39 dan 61.

Adapun perbandingan capaian Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim dari tahun 2020 sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Efektivitas Diplomasi Maritim	70	60,70%	61,54%	76,65%	75,80%	70%	70%

Capaian Indikator Diplomasi Maritim berdasarkan dari dua variabel yakni **Variabel Dialog** dan **Variabel Misi**. Indikator pada variabel Dialog adalah Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (**sumber data Kementerian Luar Negeri**), sedangkan Indikator pada variabel Misi (**sumber data Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim**) adalah Pertama, Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Kedua, Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman.

Adapun perincian capaian Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim akan dihasilkan pada akhir tahun 2024. Dan kegiatan-kegiatan yang mendukung Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim pada Triwulan I tahun 2024 dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim dapat dilihat pada Tabel 3.18. dibawah ini.

Tabel 3.18. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim yang Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim pada Triwulan I tahun 2024

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	1	Percepatan Pelaksanaan Perpres No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (<i>Carbon Capture Storage</i>)
	2	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN
	3	Koordinasi Penyusunan Task Force Pelaksana Pengaturan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Indonesia.
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	4	Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan beberapa Negara (Inggris dan Amerika Serikat).
Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	5	Koordinasi dan Sosialisasi B12 Target Tahun 2023 Kepada Kementerian Dan Lembaga Dalam Rangka Optimalisasi Pelaporan Renaksi KKI

Khusus Kegiatan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Uzbekistan tidak dilanjutkan, sebab sudah dilakukan identifikasi dan menghasilkan bahwa kerja sama tersebut tidak mendapatkan potensial yang baik bagi Pemerintah Indonesia. Sedangkan Koordinasi

Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Korea di tunda pelaksanaannya di triwulan III tahun 2024.

Adapun kegiatan-kegiatan Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim yang tertunda pelaksanaannya pada Triwulan I menjadi Triwulan II tahun 2024 dalam Mendukung Variabel Kewilayahan Maritim

Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasn Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	1	Koordinasi Percepatan Pengesahan ILO Convention No. 188 (merupakan instrumen internasional yang mengatur perlindungan kepada ABK perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal-kapal ikan mempekerjakan ABK dengan kondisi layak)
	2	Koordinasi Percepatan Pengesahan <i>Capetown Agreement</i> (CTA) 2012 (merupakan instrumen internasional yang mengatur mengenai persyaratan minimum pada desain, konstruksi, peralatan, dan inspeksi kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih. Pengesahan atas CTA 2012 akan disusun melalui Peraturan Presiden)
Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	3	Koordinasi Penyusunan Penyesuaian Renaksi KKI Tahun 2021-2025
	4	Koordinasi Penyusunan Renaksi KKI Tahap Ke-3 2026-2030
	5	Koordinasi Penyusunan Laporan KKI Tahun 2023

Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi triwulan I tahun 2024 yang belum dilaksanakan, karena penyelesaian isu isu strategis yang menjadi prioritas Bapak menko. Untuk itu maka direkomendasikan kepada unit eselon II agar merevisi renaksinya sehingga penyelesaian renaksi ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya

3.3. *Intermediate Outcome* (SS.2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi)

Intermediate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis kedua pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, yang terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan

Energi yang Ditindaklanjuti. **Kedua**, Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Perspektif *Intermediate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,3. Capaian Kinerja *Intermediate Outcome* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang dihitung pada akhir tahun 2024. Adapun IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang termasuk dalam *Intermediate Outcome* sebagai berikut.

Tabel 3.19. Capaian Intermediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
2	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
<i>Intermediate Outcome</i>		100%

Defenisi Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Martim dan Energi merupakan Seluruh rumusan kebijakan Isu-Isu Strategis di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun capaian kinerja SS.2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Martim dan Energi dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja SS.2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Martim dan Energi dari tahun 2020 sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2024	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.1. IKU 4: Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti

IKU 4 adalah Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L}}{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

Defenisi Tingkat capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah tingkat yang tersusun berdasarkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan ke Menko dan dikalikan seratus persen. Tujuan pengukuran Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah Untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi TW I	
Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU Rancangan Kebijakan yang ditindaklanjuti merupakan capaian dari beberapa Rancangan Kebijakan sebagai berikut:



3.3.1.1 Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi


Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi adalah kepemimpinan dan eksistensi Indonesia di level Internasional sangat perlu diperhatikan dengan baik, dimana Indonesia merupakan satu entitas dari banyaknya negara di Dunia ini yang tergabung dan memiliki keterikatan dengan beberapa organisasi maupun pertemuan internasional oleh karena itu kontribusi Indonesia dalam pembangunan global terutama dibidang kemaritiman perlu didorong dengan berkontribusi pada pertemuan-pertemuan internasional pada pertemuan di bidang Bilateral, Regional maupun Multilateral.

Target dalam Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Meningkatnya Pengaruh Indonesia di level internasional; 2). Terbukanya peluang potensi kerja sama yang saling menguntungkan diberbagai sektor antar negara mitra; 3). Terbukanya peluang potensi kerja sama yang saling menguntungkan antar private sector; 4). Terbukanya potensi pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan beberapa Negara (Inggris dan Amerika Serikat).

Kendala Rancangan Kebijakan ini di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Uzbekistan tidak dilanjutkan, sebab sudah dilakukan identifikasi dan menghasilkan bahwa kerja sama tersebut tidak mendapatkan potensial yang baik bagi Pemerintah Indonesia. Sedangkan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Korea di tunda pelaksanaanya di triwulan III tahun 2024.

Pengaruh Sumber Daya dalam Rancangan Kebijakan ini adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi pada pertemuan-pertemuan internasional pada pertemuan di bidang Bilateral, Regional maupun Multilateral, seperti halnya serangkaian agenda rutin sidang tahunan IMO. Indonesia akan mempertahankan peran aktifnya dalam sidang-sidang yang diagendakan oleh IMO. Terbukti Indonesia terpilih kembali sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025. Kemenko Marves sebagai salah satu Kementerian yang



aktif dalam melakukan diplomasi-diplomasi dalam menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO.


Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini untuk triwulan II tahun 2024 adalah 1). Terkait kerja sama dengan Inggris untuk pelaksanaan Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Korea yang rencana awal akan dilaksanakan pada Triwulan I, atas usulan dari Pemerintah Korea dan kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia akan dijadwalkan ulang pada bulan Juni 2024; 2). Pelaksanaan BMF RI-Inggris yang semula akan dilaksanakan di triwulan IV akan diusulkan untuk dapat dipercepat pelaksanaannya. Hal ini dilakukan mengingat akan adanya Pergantian Presiden atau perlihian pemerintah baru; 3). Kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) terkait ekspor Listrik dari Indonesia ke PNG baru dalam pada tahap kesepakatan harga atau tarif Listrik yang akan diekspor ke PNG; 4). Penyusunan inisiatif dan usulan-usulan Pemerintah Indonesia baru akan dilakukan submisi proposal *character building*, akan bersamaan dengan penyampaian hasil JTWG kedua dalam sidang IMO-MSC ke-108 pada bulan Mei 2024 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan.

3.3.1.2 Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi adalah pada tanggal 13 Desember 2019 sudah ditandatangani inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan ESDM maka ditandatangani Mou dengan 8 KL terkait berbagi pakai data, antara lain BMKG, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, BIG, BPPT, LIPI dan BAPPENAS, yang dilanjutkan pada tanggal Tahun 2021 sudah ditandatangani Mou dengan 8 KL MoU dengan 8 K/L terkait Penegakan Hukum dilaut antara lain Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, POLRI, BASARNAS, dan BAKAMLA.

Target dalam Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Pemerintah Indonesia akan memiliki teknologi yang lebih mutakhir dalam pengawasan laut dan pelabuhan; 2). Terselenggaranya patroli keamanan dan pengawasan laut dalam rangka menjaga kedaulatan maritim; 3). Terkoordinasi keamanan dan pengawasan laut di Indonesia.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Pertemuan 2nd IORIS Steering Committee Meeting di Colombo, Sri Lanka.




Kendala Rancangan Kebijakan ini di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Belum terlaksananya Koordinasi untuk memberikan pelatihan operasional API Hub dan Dashboard Analytics bagi operator dan analis K/L terkait (Tahap Pemula); 2). Belum terlaksananya Koordinasi Penyusunan SOP Pemeriksaan Kapal Oleh Tim Teknis; 3). Koordinasi Dukungan konfigurasi API Hub dan Dashboard Analytics di masing-masing K/L.


Tindak lanjut Rancangan Kebijakan untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Melakukan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan pemeriksaan kerentanan keamanan siber pada platform API Hub; 2) Peningkatan kapasitas personil dalam pengawasan maritim dalam hal ini dalam menganalisis data dan informasi pada API Hub.

3.3.1.3 Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional adalah pasal 76 ayat 3, 4, dan 5 UNCLOS 1982 memungkinkan Indonesia untuk memperluas landas kontinen di luar 200 Mil hingga batas maksimal 350 Mil atau hingga jarak 100 mil dari kedalaman 2500 mil sepanjang dapat dibuktikan bahwa Indonesia memiliki kepanjangan alamiah dari daratan Indonesia hingga pada batas jarak dan kedalaman maksimal sebagaimana ditentukan. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian kebijakan penetapan landas kontinen Indonesia di luar 200 Mil laut pada tahun 2018 merekomendasikan pembentukan dan penetapan Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji ada tiga wilayah potensi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua pada tahun 2019 ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS). Keberhasilan submisi tersebut diikuti dengan penyampaian submisi parsial berikutnya pada tahun 2020 untuk segmen barat daya Sumatra sebesar 211.397,7 km² atau lebih luas dari pulau Jawa dan Submisi pada tahun 2022 untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara. Selain itu perlu adanya komunikasi yang berkelanjutan dengan negara-negara pihak. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan saat pesat, gambaran potensi ekonomi yang besar dari



pemanfaatan sumber daya marine genetic semakin terbuka lebar. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi internasional yang mengatur pengelolaan Marine Biological Diversity Beyond Areas Of National Jurisdiction (BBNJ). Kondisi geografis Indonesia memiliki kepentingan langsung (direct interest) terhadap BBNJ. Sebagian perairan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia bersebelahan atau berbatasan langsung dengan perairan Internasional yang merupakan area dari substansi pengaturan BBNJ. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan langsung atas dasar fakta bahwa keanekaragaman hayati di lautan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sehingga suatu kondisi di area beyond national jurisdiction tentunya akan mudah mempengaruhi kondisi yang berada di perairan nasional Indonesia. Salah satu hak Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS 1982 yang tak boleh diindahkan adalah hak Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral di dasar lautan internasional melalui otoritas dasar laut internasional (International Seabed Authority). Sebagai negara pihak UNCLOS dan bagian dari masyarakat Internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi Indonesia secara ekonomi dan juga baik bagi lingkungan karena dengan demikian Indonesia juga dapat melakukan pengelolaan Kawasan dasar laut internasional sesuai standar lingkungan secara internasional, guna menjaga the Area sebagai warisan bersama umat manusia (the common heritage of human kind). Hak pemanfaatan sumber daya mineral di the Area dimaksud dapat diperoleh Indonesia apabila Indonesia melalui koordinasi kebijakan nasional menyampaikan permohonan pengelolaan dan pemanfaatan sebuah wilayah kepada otoritas dasar laut internasional (ISA). ISA sesuai Bab XI UNCLOS 1982 diberi mandat untuk mengelola pemanfaatan sumber daya mineral dan mendorong pelaksanaan riset kelautan di dasar laut internasional. Otoritas internasional ini juga diberi mandat untuk membagi manfaat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di the Area kepada negara lain (terutama negara berkembang) melalui program peningkatan kapasitas dan transfer teknologi. Pada tanggal 12 Desember 2023, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Peran Aktif Indonesia di KDLI. Pengesahan Perpres tersebut tentunya menjadi payung hukum bagi Indonesia dalam melakukan rencana pengelolaan mineral di KDLI. Sesuai dengan amanat Perpres tersebut, Kemenko Marves perlu segera membentuk Peraturan Pelaksana dalam hal ini Permenko tentang Tim Koordinasi, yang dalam hal ini Menko Marves akan menjadi Koordinator.



Tujuan dalam Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Terwujudnya submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua, submisi parsial untuk segmen barat daya Sumatra sebesar 211.397,7 km² atau lebih luas dari pulau Jawa dan Submisi untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara pada ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS). 2). Mewujudkan langkah strategis Indonesia untuk melakukan ratifikasi dan implementasi perjanjian BBNJ; 3). Terwujudnya posisi dasar untuk mengakomodir kepentingan Indonesia dalam penyusunan draft Exploitation Regulation (DRE); 4). Terwujudnya regulasi (Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaannya); 5). Terwujudnya roadmap percepatan pengajuan reserved area (area yang dicadangkan) di CCZ kepada Sekjen ISA.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung yaitu Koordinasi Penyusunan Permenko Marves terkait Pembentukan Tim Koordinasi sesuai Mandat Perpres 80/2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI).

Kendala Rancangan Kebijakan ini di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Belum terlaksananya Koordinasi Kickoff Persiapan Ratifikasi Perjanjian BBNJ oleh Indonesia; 2). Belum terlaksananya Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan National Consultation / Diseminasi Perjanjian BBNK kepada stakeholder nasional.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Melakukan diseminasi terkait Perjanjian BBNJ kepada seluruh stakeholder di Indonesia. Diseminasi/ Konsultasi Nasional akan dilakukan per regional agar lebih efektif Kegiatan ini diagendakan akan turut mengundang narasumber dari UN DOALOS sebagai pemangku utama; 2). Mengakselerasi pembentukan regulasi nasional sebagai proses ratifikasi BBNJ oleh Indonesia; 3). Menyusun dan Mengakselerasi Pembentukan Peraturan-Peraturan Turunan dari Perpres KDLI yakni: a. Permenko terkait Tim Nasional; b. Peraturan Menteri ESDM; 4). Menyusun dan menyampaikan Proposal Kontrak Eksplorasi yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia kepada ISA. Entitas yang menyampaikan proposal bisa merupakan joint venture antara BUMN/Swasta Nasional dengan Perusahaan Internasional yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas di KDLI.



3.3.1.4 Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)


Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) adalah *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum yang merupakan bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tujuan Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Terwujudnya Regulasi Nasional dalam bentuk Perpres tentang Peran Indonesia untuk AIS Forum dapat disahkan pada Oktober 2024; 2). Terwujudnya Strategi Elevasi AIS Forum sebagai Treaty/Charter Based Organization terbentuk dalam lampiran rencana aksi dan roadmap yang akan dijalankan oleh tim koordinasi sesuai amanat Perpres yang akan diterbitkan; 3). Mewujudkan hasil KTT AIS Forum yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pelaksanaan pertemuan tingkat pejabat tinggi kedelapan dan pertemuan tingkat Menteri ke 6 di Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung yaitu Koordinasi Persiapan Kelanjutan Kontribusi Indonesia untuk AIS Forum dan Koordinasi Kickoff Rencana Kerja Sekretariat AIS Forum Tahun 2024.

Kendala Rancangan Kebijakan ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Kemenko Marves akan sampaikan laporan pemanfaatan secara langsung agar rekomendasi pencairan termin 2 dapat diterbitkan; 2). Pasca rekomendasi terbit, tim akan segera melakukan proses administrasi pencairan dan penyalura anggaran termin 2 sesuai prosedur dan aturan yang berlaku; 3). Perlu arahan deputi terkait dengan rencana antisipasi rencana pencairan termin 3 pada tahun 2025, sehubungan dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian penggunaan APBN Kementerian/Lembaga.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Pembentukan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia pada AIS Forum. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan posisi dan peran Indonesia baik dalam diplomasi maritim maupun dalam pengembangan berkelanjutan bagi negara-negara pulau dan kepulauan; 2). Pengesahan dana kontribusi Indonesia untuk AIS Forum sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden dalam HLM AIS Forum tahun 2023; 3). Sebagai bentuk tindak lanjut Leaders Declaration HLM AIS Forum, Pemerintah



Indonesia juga harus mulai segera melakukan berbagai persiapan untuk menyelesaikan mandat yang diberikan, di antaranya, a. Penyelenggaraan Ministerial Meeting ke-6 di Indonesia; b. Kontribusi aktif dan kepemimpinan pada *Senior Official Meeting*.


3.3.1.5. Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional adalah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian mengatur bahwa Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. Pada tahun 2020 IMO memberitakan jasa pandu Indonesia melalui surat edaran/circular, kemudian pada tahun 2022 pertemuan TTEG ke-45 (20-21/7/2022), Indonesia mempresentasikan information paper revisi aturan STRAITREP, mengusulkan VTS Batam dan Dumai berbagi tanggung jawab pengelolaan STRAITREP. Sedangkan pengajuan Proposal ke pertemuan TTEG ke 46 untuk di setuju pada TTEG di ajukan pada tahun 2023.

Tujuan Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Tercapainya pengambilalihan pengolahan Ship Reporting System (Straitrep/SRS) di Selat Malaka dan Selat Singapura; 2). Terwujudnya Upgrading sarana prasarana, system dan peralatan VTS Batam dan Dumai.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Lanjutan Persiapan Substantif Public-Private Forum Dialog Shipping Related Matters; 2). Koordinasi Identifikasi Potensi Jasa Maritim di Kepulauan Riau; 3). Koordinasi Public-Private Forum Dialog on Shipping Related Metters; 4). Koordinasi Percepatan Perizinan dan Operasi Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPKL) dan PT Layar Nusantara Gas (PTLNG).

Kendala Rancangan Kebijakan ini di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Proposal revisi aturan STRAITREP yang diajukan Indonesia memicu para pemangku kepentingan lain mendorong dilakukannya kaji ulang sistem rute dan telekomunikasi SOMS secara menyeluru 2). Cooperative Mechanism/CM tengah mengkaji secara teknis tiga proposal revisi sistem rute, yakni ekstensi TSS ke sebelah timur, ekstensi TSS ke sebelah barat, dan perubahan sistem rute di Sektor 7;3) Terdapat kesan




bahwa industri belum merasa confident dengan prospek keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP. Mereka memandang bahwa sistem telekomunikasi pada TSS di SOMS saat ini sudah berjalan baik dan efisien. Selain itu, kami memperoleh informasi tidak resmi bahwa Malaysia dan Singapura telah memutuskan untuk tidak melepaskan pengelolaan STRAITREP di sektor 5-9.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan bahwa keberlanjutan SOMS dalam jangka panjang bergantung pada skema pengelolaan yang adil dan pengelolaan inklusif. Oleh karena itu, CM perlu menyusun roadmap keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan STRAITREP secara bertahap; 2). sebagai tahap pertama, IMO perlu mengumumkan bahwa pengelolaan lalu lintas di perairan di selatan TSS menjadi tanggung jawab VTS Indonesia karena sepenuhnya berada di teritori Indonesia. Untuk mendukung hal ini, CM perlu menyusun SOP serah terima kapal yang berlayar keluar dari batas TSS pada sisi Selatan; 3). Pemerintah Indonesia kiranya dapat mendukung dilakukannya ekstensi TSS di sisi timur dan barat, dengan syarat Indonesia ditetapkan menjadi pengelola telekomunikasi di ujung barat TSS (Sektor 1) dan ujung timur TSS (Sektor 10). Posisi ini kami pandang paling strategis dimana Indonesia akan dapat mengakses informasi seluruh kapal yang melintas masuk dan keluar dari TSS; 4). perlu komitmen finansial pemerintah dalam rangka meningkatkan kesiapan teknis a.l. meningkatkan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di VTS Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menyusun rencana teknis pengembangan, peremajaan, dan upgrading peralatan VTS Batam dan Dumai dengan total rencana anggaran biaya senilai Rp244.901.633.589 (Batam Rp96.005.352.000, Dumai: Rp148.896.281.589); 5). Bila Indonesia mendapatkan tanggung jawab pengelolaan STRAITREP pada Sektor 1 dan 10, akan diperlukan tambahan investasi di luar RAB yang telah disusun.

3.3.1.6. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas adalah Minyak dan Gas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi



hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014–2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%.

Tujuan Rancangan Kebijakan ini adalah 1). Tercapainya target realisasi investasi sektor migas; 2). Tercapainya target PNBPD dari sektor migas; 3). Tercapainya target produksi minyak dan gas bumi; 4). Porsi pemanfaatan gas untuk domestik meningkat; 5). terselesaikannya target pembangunan pipa transmisi dan Jargas Rumah Tangga; 6). Pemenuhan kebutuhan BBM dan petrokimia nasional; 7). Penurunan Emisi GRK sektor migas.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Migas Dan Hilirisasi Industri Migas; 2). Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR)); 3). Koordinasi penerbitan regulasi dalam rangka penurunan emisi GRK sektor migas; 4). Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 10 Kota.

Kendala Rancangan Kebijakan ini di triwulan I tahun 2024 adalah Belum terlaksananya Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Produksi migas dalam 10 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Hal ini dikarenakan banyak lapangan migas di Indonesia yang sudah mature/tua. Sehingga produksi dari sumur–sumur migas eksisting sulit untuk ditingkatkan dalam mencapai target nasional. Hal yang dapat dilakukan yaitu mencari lapangan –lapangan migas baru dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, eksplorasi lapangan migas baru juga dapat menjaga cadangan migas nasional tetap aman dalam jangka panjang. Tantangan yang dihadapi yaitu eksplorasi membutuhkan waktu yang lumayan panjang berkisar 4-6 tahun serta proses menuju produksi awal mencapai 10 tahun. Hal ini diakibatkan panjangnya proses perizinan di kegiatan usaha hulu migas Indonesia selain juga koordinasi lapangan migas Indonesia dengan cadangan yang mengarah pada laut dalam. Penyederhanaan proses perizinan dapat membantu percepatan proses menuju tahap produksi lebih awal sehingga target produksi migas nasional dapat segera tercapai. Penyusunan kebijakan seperti Rancangan Peraturan Presiden dapat membantu proses kegiatan usaha hulu migas saat ini dapat disederhanakan dengan koordinasi antar 18 Kementerian/Lembaga

yang terlibat menjadi lebih efektif; 2). Proses penyusunan Rancangan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon saat ini tinggal menunggu paraf antar Menteri untuk dapat disahkan di tahun 2024. Peraturan Presiden dalam kegiatan *Carbon Capture Storage*, menjadi sangat penting karena banyak lembaga finansial di dunia hanya ingin mendanai proyek hulu migas jika sudah ada strategi dekarbonisasi pada rencana proyeknya. Dalam memastikan implementasi kegiatan CCS ini dapat terlaksana, perlu dilakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan alokasi karbon dari dalam negeri dan luar negeri melalui skema cross-border, proses perizinan transportasi dan penyimpanan karbon, dan biaya penyimpanan dari setiap proyek. Pembentukan tim kerja koordinasi akan sangat penting dalam menetapkan peran masing-masing Kementerian/ Lembaga untuk terlaksananya kegiatan *Carbon Capture Storage* di Indonesia.

3.3.2. IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, merupakan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, dan proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}} \times 100\%$$

Definisi Tingkat capaian persentase isu strategis yang diselesaikan berdasarkan jumlah isu strategis yang diselesaikan dibagi jumlah isu strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan dan dikali seratus persen. Tujuan Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan adalah untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target. Capaian kinerja Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Triwulan I Tahun 2024

		2020	2021	2022	2023		


Indikator Kinerja	Target 2020-2024	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2024 Realisasi TW I	Target Renstra 2024
Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan merupakan capaian dari beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

3.3.2.1 Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration

Dasar Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration adalah peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi middle income country (MIC) dan anggota G-20, memposisikan Indonesia menjadi semakin berperan dalam berbagai forum regional dan internasional guna mempercepat capaian target pembangunan nasional. Salah satu strategi diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memaksimalkan peran Indonesia sebagai negara mitra strategis dan pemberi bantuan baik teknis, kemanusiaan, dukungan politis, dan inovasi keuangan serta hibah kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Dasar lainnya sebagai pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang yang lain adalah Risalah Rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beserta Pimpinan Internal eselon 1 serta eselon 2 pada tanggal 20 Juli 2023 (terlampir).

Tujuan Isu Strategis ini adalah 1). Terwujudnya berbagai kepentingan nasional Indonesia dalam upaya peningkatan citra kepemimpinan Indonesia (leadership) di tingkat global serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional yang saling menguntungkan melalui pembentukan suatu Aliansi atau Grup negara-negara berkembang yang di-lead oleh Indonesia; 2). Aliansi atau Grup negara-negara berkembang ini akan menjadi “wahana” yang mampu merespon dan memberikan solusi terbaik terhadap dinamika isu-isu ekonomi dan isu-isu strategis pembangunan di semua forum yang relevan. Oleh karena itu, Aliansi atau Grup negara-negara berkembang ini akan berguna bagi para Pemimpin, Menteri, Badan Sektoral, dan Mitra untuk sejalan dengan arah kerja sama ekonomi berkembang melalui kerja sama Selatan-Selatan; 3). Aliansi atau Grup negara-negara berkembang akan menetapkan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar Kerja sama Selatan-Selatan untuk melakukan kerja sama ekonomi



dan pembangunan berbasis keberlanjutan di berbagai sektor; serta nilai-nilai kebangsaan semua negara berkembang tentang inklusivitas, transparansi, saling menghormati, dan saling percaya. Aliansi atau Grup negara-negara berkembang tersebut akan melengkapi mekanisme atau proses internasional yang relevan di bawah perjanjian dan kerangka kerja sama yang telah ada; 4). Aliansi atau Grup negara-negara berkembang akan menyeimbangkan dan menyatukan persepsi dan pemahaman semua negara anggota untuk melakukan diskusi yang lebih terfokus dan terpadu mengenai masalah ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dengan berdasarkan pada semangat kesetaraan dan menghormati kedaulatan negara.

Tujuan Isu Strategis ini adalah 1). Terwujudnya pelaksanaan kerja sama berbagai MOU yang telah di sepakati dalam tahun 2023; 2). Terwujudnya penambahan kerja sama dengan Negara Selatan-Selatan di kawasan lainnya, seperti Amerika Selatan dan Asia Pasifik.

Dalam penyusunan Isu Strategis pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Penyusunan Suggested Points of Interventions BMD ke 2 RI Prancis; 2). Koordinasi BMD ke 2 RI Prancis; 3). Koordinasi interkem persiapan FGD UUV; 4). Koordinasi JTC on Mining di Kenya; 5). Koordinasi Task Force Percepatan Kerja Sama Indonesia-Mozambik.

Kendala Isu Strategis ini di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Kerja Sama RI-Kenya terkait bidang pertanian memerlukan Kementerian Pertanian mendapatkan IP dari Presiden untuk menyusun RPP revisi PP 4 tahun 2016 (apabila disetujui oleh Presiden) dan Badan Karantina Nasional akan mengajukan IP kepada Presiden melalui Setneg untuk penyusunan PP turunan UU no 21 tahun 2019 pasal 25.; 2). Kerja Sama RI-Zambia, baru menncapai tahap nasional mengenai potensi-potensi yang dapat dieksekusi; 3). Koordinasi dengan BUMN dan Private Sector untuk Persiapan Pertemuan dengan UNHQ.

Tindak lanjut Isu Strategis ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Identifikasi pelaporan progres update kerja sama Indonesia baik pemerintah maupun sektor bisnis dengan negara-negara selatan; 2). Pengajuan kick off meeting antara Menko Marves dan Menteri Energi Mozambik yang direncanakan pada minggu ke-4 April 2024; 3). Penyampaian finalisasi terhadap draf RPP terkait Pemasukan Hewan dengan Karantina Maksimal; 4). Mendorong dan berkoordinasi implementasi kerja sama PLN dan Esyasof.



3.3.2.2 Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi


Dasar Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi adalah Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan realignment tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan realignment FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sky navigational master di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melanjutkan usaha berkesinambungan yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan Realignment FIR dan Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Tahun 2022 Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR) dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (Leaders' Retreat) yang bertempat di Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dimana Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerjasama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat.

Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (realignment flight information region - FIR); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (extradition treaty); dan (3) Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (Defense Cooperation Agreement - DCA 2007).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) di hadapan kedua Kepala Negara. Surat



yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerjasama tersebut secara simultan.

Tujuan Isu Strategis ini adalah 1). Terwujudnya pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ratifikasi Perjanjian Kerja sama Pertahanan; 2). Terwujudnya penambahan; 2). Terwujudnya pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Buronan; 3). Terwujudnya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Dalam penyusunan Isu Strategis pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Proses Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura tentang FIR, DCA, dan Ekstradisi; 2). Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembiayaan Personel CMAC di SATCC pada K/L terkait; 3). Penyampaian Rekomendasi Penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) Indonesia-Singapura pada Direktur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama Perum, LPPNPI/Airnav.

Kendala Isu Strategis ini di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Secara operasional FIR Singapura yang berada di atas ruang udara Indonesia telah dialihkan oleh ICAO menjadi FIR Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024; 2). Adanya 10 orang personil gabungan TNI, AirNav, dan Kementerian Perhubungan RI juga mulai bertugas sebagai personil CMAC di Menara pengawas lalu lintas penerbangan Singapura, sehingga diperlukan penyesuaian lingkungan kerja bagi 10 orang tersebut.

Tindak lanjut Isu Strategis ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Kementerian penjurur masing-masing perjanjian, yakni FIR (Kemhub), DCA (Kemhan), dan ET (Kemenkumham) telah menyatakan persetujuan atas proses pemberlakuan yang berjalan (joint Aeronautical information area Flight Information Region terbaru pasca disepakatinya perjanjian FIR 2022). Selain itu mereka juga telah siap melakukan langkah-langkah strategis implementasi; 2). Kemhan memiliki pekerjaan rumah untuk segera menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan untuk membentuk implementing arrangements (IA) perjanjian DCA. Hal ini harus mencakup berbagai proposal perubahan teknis dikaitkan kondisi terkini area yang akan digunakan untuk latihan militer. IA harus dibicarakan dan disepakati kedua negara melalui Joint Defence Cooperation Committee antara Kemhan RI dan Mindef Singapura.




3.3.2.3 Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum)

Dasar Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum) adalah **Pertama**, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (Arcfiipeiagic and Island States) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023. **Kedua**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan Senior Official Meeting (SOM) ke 7 AIS Forum di Suva – Republik Fiji pada tanggal 7 Juni 2023 yang berhasil meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS Forum; **Ketiga**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan Ministerial Meeting (MM) ke 5 AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 30 Negara dan 3 Organisasi Internasional menghasilkan kesepakatan disepakati untuk memperkuat komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama AIS Forum di masa mendatang; **Keempat**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan 1st High Level Meeting (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri 32 Negara dan 4 Organisasi Internasional berhasil menghimpun partisipasi dari berbagai stakeholder terutama dari para pemuda pemudi di negara-negara AIS Forum.

Tujuan Isu Strategis ini adalah 1). Terwujudnya Pembentukan Regulasi Nasional untuk AIS Forum; 2). Terwujudnya penambahan; 2). Terwujudnya Strategi Elevasi AIS Forum sebagai Treaty/Charter Based Organization; 3). Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) dan Tingkat Menteri (MM) 2024.

Target Isu Strategis ini adalah 1). Terwujudnya Regulasi Nasional dalam bentuk Perpres tentang Peran Indonesia untuk AIS Forum dapat disahkan pada Oktober 2024; 2). Terwujudnya Strategi Elevasi AIS Forum sebagai Treaty/Charter Based Organization terbentuk dalam lampiran rencana aksi dan roadmap yang akan dijalankan oleh tim koordinasi sesuai amanat Perpres yang akan diterbitkan; 2). Terwujudnya Pelaksanaan SOM dan MM guna membahas perkembangan proses pembentukan AIS Forum sebagai OI dapat dilaksanakan pada TW III dan TW IV tahun 2024.

Dalam penyusunan Isu Strategis pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu secara umum proses koordinasi antar KL untuk tindak lanjut amanat kepala negara telah disepakati untuk melalui 2 strategi utama yaitu: Penyusunan regulasi nasional yang mencakup roadmap pembentukan AIS Forum sebagai



Oi sekaligus penguatan tim koordinasi di tingkat nasional Perlu komunikasi formal dengan negara-negara AIS terkait roadmap yang telah coba disusun oleh tim koordinasi nasional melalui technical meeting/SOM/MM.

Kendala Isu Strategis ini di triwulan I tahun 2024 adalah 1). dibutuhkan koordinasi yang intens antar K/L terkait untuk percepatan penyusunan draft regulasi nasional; 2). Perlu adanya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan technical meeting/SOM dan MM tahun 2024.

Tindak lanjut Isu Strategis ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Perlu dilaksanakan rapat koordinasi antar K/L terkait secara intens untuk percepatan penyusunan draft regulasi nasional (Perpres) AIS Forum; 2). Perlu arahan Deputi terkait **Pertama**, Pelibatan K/L kunci di dalam tim kerja nasional, mengingat akan adanya perubahan kabinet pemerintahan di akhir tahun 2024; **Kedua**, Dorongan administratif penyelenggaraan anggaran tambahan untuk rencana pelaksanaan technical meeting/SOM/MM.

3.4. *Immediate Outcome* (SS.3. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi)

Immediate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis ketiga pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, yang terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, Presentase Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. **Kedua**, Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Perspektif *immediate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,2. Capaian Kinerja *Immediate Outcome* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang dihitung pada akhir tahun 2024. Adapun IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang termasuk dalam *Intermediate Outcome* sebagai berikut.

Tabel 3.22. Capaian Intermediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85%
2	Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76%

3.4.1. IKU 6: Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Defenis Indikator ini menggambarkan Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Capaian Kinerja Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	Realisasi Triwulan I 2024	Target 2024	Target Renstra 2024
Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Tidak WBK	Tidak WBK	Tidak dilaksanakan karena Kemenko Marves tdk masuk persyaratan nilai SPIP	Diusulkan menjadi WBK tapi tdk mendapatkan predikat WBK	Diusulkan menjadi WBK, progress mendapatkan predikat WBK	85%	N/A**

Sumber. LHE 2020 dan LHE 2023

Dalam mendukung penilain PMPZI pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Sosialisasi dan Asistensi SKP Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Finalisasi RB Tematik; 3). Koordinasi Penyusunan Laporan TU Persuratan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Bulan Januari-Maret 2024; 4). Koordinasi Dalam rangka tata tertib administrasi pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah memfasilitasi sosialisasi dan asistensi tata cara pengisian kedua laporan tersebut.

Kendala Isu Strategis ini di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Adanya usulan kegiatan RB Tematik Tahun 2024 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang akan diinput ke dalam portal RB Tematik RB Nasional pada tanggal 16 Februari 2024. Terdapat 2 (dua) tema Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi dengan 4 (empat) kegiatan RB Tematik; 2). Adanya Penilaian SKP per bulan pada PNS untuk tahun 2024 melalui Aplikas e-Kinerja BKN.

Tindak lanjut Isu Strategis ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan menyusun Rencana Aksi dari masing-masing kegiatan RB Tematik 2024 dengan dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan RB Tematik per triwulan; 2) Memonitoring dan mengevaluasi penginputan data dan melakukan penilaian SKP dari bulan Januari-Maret 2024 bagi PNS Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui Aplikasi e-Kinerja BKN.

3.4.2. IKU 7: Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Defenis Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Capaian Kinerja Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.


Tabel 3.22. Capaian Kinerja Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target Renstra 2024
	Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70%	64,85 %	70%	67,53 %	70%	70,14 %	72%	75,45 %	76%

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

**) tidak ada target pada dokumen Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Dasar Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan dievaluasi melalui Lembar Hasil Evaluasi (LHE), pelaksanaan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves. Tujuan Nilai SAKIP adalah Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.



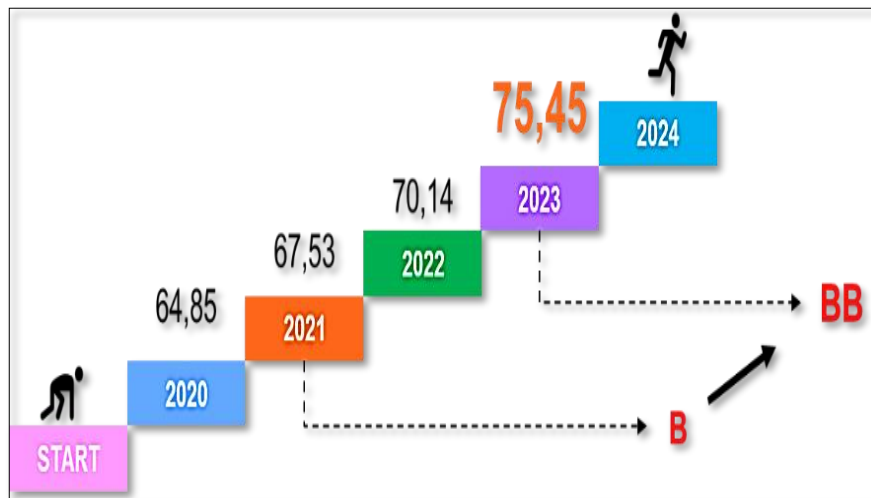
Dalam mendukung penilain SAKIP pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Penyusunan Manual IKU dan Rencana Aksi tahun 2024; 3) Koordinasi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024; 4) Koordinasi Perubahan POK Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024; 5) Koordinasi Penyusunan . Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Kendala Isu Strategis ini di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Adanya usulan format penyusunan Manual IKU dan Rencana Aksi tahun 2024 yang baru; 2). Adanya pemblokiran anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024.

Tindak lanjut Isu Strategis ini untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan melakukan koordinasi untuk penilaian capaian kinerja triwulan I tahun 2024 bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Kemenko Marves; 2). Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui Aplikasi e-monev Bappenas bulan Januari-Maret 2024, Laporan TU bulan Januari-Maret 2024, Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bulan Januari-Maret 2024 dan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi triwulan I tahun 2024.

***Success story* Hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah nilai hasil evaluasi sebesar 75,45 atau tingkat akuntabilitas kinerja BB dengan interpretasi Sangat Baik di bandingkan pada tahun 2022 adalah nilai hasil evaluasi sebesar 70,14 sehingga selisih kenaikan nilai hasil evaluasi sebesar 5,31 poin. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.12 di bawah ini.**

Gambar 3.12. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023



Peningkatan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dikarenakan antara lain yaitu, 1). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berhasil meningkatkan Nilai SAKIP di tahun 2023 karena Deputy ini memperbaiki evidence SAKIP berdasarkan Rekomendasi atau catatan Inspektorat pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) tahun 2022; 2). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di LKE untuk mendongkrak nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 3). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi meningkatkan kualitas evidence dalam pemenuhan kriteria pada LKE. Sedangkan perbandingan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan Kedeputian lain dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.22. Perbandingan Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan Kedeputian lain dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 sampai 2023

NO	2020	2021	2022	2023
1	SET (78,28)	SET (79,48)	SET (79,54)	SET (82,75)
2	D2 (71,78)	D2 (75,97)	D2 (75,87)	D6 (76,05)
3	D3 (71,20)	D6 (69,81)	D6 (71,45)	D2 (75,80)
4	D6 (65,31)	D3 (69,72)	D3 (71,20)	D1 (75,45)
5	D4 (65,15)	D4 (68,74)	D4 (70,75)	D4 (74,95)
6	D1 (64,85)	D1 (67,53)	D5 (70,40)	D5 (74,80)
7	D5 (64,51)	D5 (67,42)	D1 (70,14)	D3 (72,20)

Keterangan:

SET : Sekretariat Kementerian Koordinator

D1 : Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

D2 : Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

D3 : Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

D4 : Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

D5 : Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

D6 : Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

3.5. Analisa Keuangan

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 31 Maret 2024 di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi setelah ada blokir sebesar Rp3.118.540.000,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 23, Realisasi Anggaran UKE II per 31 Maret 2024 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	43,111,460,000	3,363,733,520	39,747,726,480	7.80
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	1,508,101,000	465,622,369	1,042,478,631	30.87
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	9,194,331,000	977,429,921	8,216,901,079	10.63
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	26,858,059,000	504,860,849	26,353,198,151	1.88
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	1,394,101,000	551,273,136	842,827,864	39.54
Asisten Deputi Energi	1,468,297,000	355,712,292	1,112,584,708	24.23
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	800,000,000	119,684,399	680,315,601	14.96
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	1,888,571,000	389,150,554	1,499,420,446	20.61

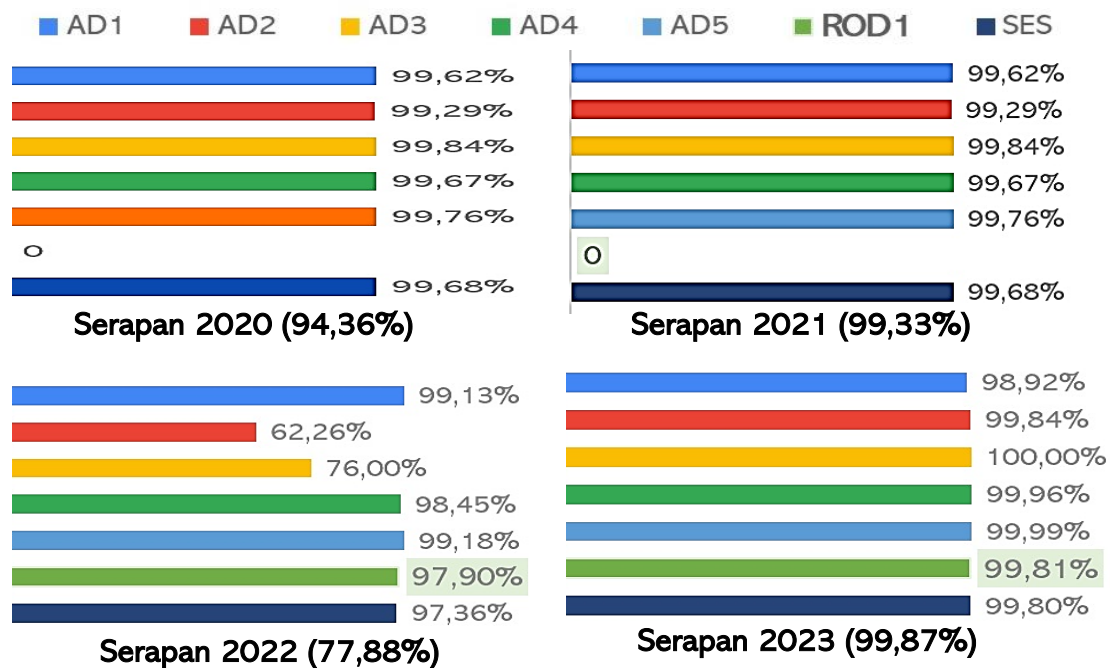
MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi		43,111,460,000	3,363,733,520	39,747,726,480	7.80%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	127,500,000	27,381,792	100,118,208	21.48%
521211	Belanja Bahan	1,728,670,000	153,057,500	1,575,612,500	8.85%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	99,550,000	-	99,550,000	0.00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,020,000,000	-	22,020,000,000	0.00%
522141	Belanja Sewa	100,704,000	-	100,704,000	0.00%
522151	Belanja Jasa Profesi	660,100,000	23,800,000	636,300,000	3.61%
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,665,680,000	-	5,665,680,000	0.00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,450,479,000	397,414,759	1,053,064,241	27.40%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,500,000	7,070,000	9,430,000	42.85%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,143,331,000	193,020,980	950,310,020	16.88%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,474,205,000	1,942,160,514	3,532,044,486	35.48%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4,624,741,000	619,827,975	4,004,913,025	13.40%

*) dalam Rupiah

Capaian Kinerja Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2024 mencapai **Rp.3,363,733,520,- (7,80%)** dari total Anggaran sebesar **Rp.43,111,460,000,-**. Tingkat Realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 sebesar **7,80%** dikarenakan adanya Perjanjian Pendanaan Pemri untuk AIS Forum (Kontribusi Sukarela Non-reguler) anggaran dalam RO atau Kegiatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar **Rp.22.000.000.000,-**

Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat dibawah ini

Gambar 3.15. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per UKE II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023



Gambar 3.23. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2022, 2021 dan 2020, hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam rencana aksi setiap Unit Kerja Eselon II tahun 2023 dengan baik.

Sedangkan Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 31 Maret 2024 di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan RO dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.24. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	1,508,101,000	465,622,369	1,042,478,631	30.87
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	549,424,000	190,705,675	358,718,325	34.71
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	498,725,000	127,738,853	370,986,147	25.61
Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	459,952,000	147,177,841	312,774,159	32.00

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim		1,508,101,000	465,622,369	1,042,478,631	30.87
521211	Belanja Bahan	225,525,000	-	225,525,000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	105,600,000	-	105,600,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86,374,000	61,441,900	24,932,100	71.13
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	810,737,000	328,298,437	482,438,563	40.49
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	279,865,000	75,882,032	203,982,968	27.11

Tabel. 3.25. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	9,194,331,000	977,429,921	8,216,901,079	10.63
Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	450,000,000	138,941,074	311,058,926	30.88
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	450,000,000	91,141,400	358,858,600	20.25
Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	450,000,000	85,086,564	364,913,436	18.91
Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	477,746,000	51,245,000	426,501,000	10.73
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Internasional (EEC Summit)	7,366,585,000	611,015,883	6,755,569,117	8.29

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim		9,194,331,000	977,429,921	8,216,901,079	10.63
521211	Belanja Bahan	754,150,000	94,300,500	659,849,500	12.50
522151	Belanja Jasa Profesi	298,800,000	-	298,800,000	-
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,629,680,000	-	4,629,680,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	172,046,000	10,225,380	161,820,620	5.94
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	227,400,000	80,840,000	146,560,000	35.55
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,172,447,000	342,676,318	829,770,682	29.23
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,939,808,000	449,387,723	1,490,420,277	23.17

Tabel. 3.26. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	26,858,059,000	504,860,849	26,353,198,151	1.88
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan dan Toponimi	600,000,000	224,411,010	375,588,990	37.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim	620,747,000	150,177,344	470,569,656	24.19
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	25,037,312,000	2,851,000	25,034,461,000	0.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	600,000,000	127,421,495	472,578,505	21.24

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan		26,858,059,000	504,860,849	26,353,198,151	1.88
521211	Belanja Bahan	135,641,000	897,000	134,744,000	0.66
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,350,000	-	20,350,000	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,000,000,000	-	22,000,000,000	-
522141	Belanja Sewa	39,828,000	-	39,828,000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	90,000,000	-	90,000,000	-
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,036,000,000	-	1,036,000,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280,060,000	89,074,187	190,985,813	31.81
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	309,576,000	52,425,980	257,150,020	16.93
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	881,760,000	267,905,462	613,854,538	30.38
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,064,844,000	94,558,220	1,970,285,780	4.58

Tabel. 3.27. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan - non kontribusi AIS Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	4,858,059,000	504,860,849	26,353,198,151	10.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan dan Toponimi	600,000,000	224,411,010	375,588,990	37.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim	620,747,000	150,177,344	470,569,656	24.19
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	3,037,312,000	2,851,000	25,034,461,000	0.09
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	600,000,000	127,421,495	472,578,505	21.24

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	4,858,059,000	504,860,849	26,353,198,151	10.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan dan Toponimi	600,000,000	224,411,010	375,588,990	37.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim	620,747,000	150,177,344	470,569,656	24.19
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	3,037,312,000	2,851,000	25,034,461,000	0.09
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	600,000,000	127,421,495	472,578,505	21.24

Tabel. 3.28. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	1,394,101,000	551,273,136	842,827,864	39.54
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	374,569,000	117,911,285	256,657,715	31.48
Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim	391,532,000	211,208,215	180,323,785	53.94
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Kecelakaan Maritim	628,000,000	222,153,636	405,846,364	35.37

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim		1,394,101,000	551,273,136	842,827,864	39.54
521211	Belanja Bahan	93,577,000	44,770,000	48,807,000	47.84
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	79,200,000	-	79,200,000	-
522141	Belanja Sewa	46,992,000	-	46,992,000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	31,200,000	-	31,200,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273,658,000	36,370,460	237,287,540	13.29
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,485,000	4,235,000	23,250,000	15.41
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	841,989,000	465,897,676	376,091,324	55.33

Tabel. 3.29. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Energi Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Energi	1,468,297,000	355,712,292	1,112,584,708	24.23
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	484,530,000	119,084,558	365,445,442	24.58
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	493,962,000	99,007,144	394,954,856	20.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Konsumsi Listrik Per Kapita	489,805,000	137,620,590	352,184,410	28.10

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
Asisten Deputi Energi		1,468,297,000	355,712,292	1,112,584,708	24.23
521211	Belanja Bahan	209,645,000	-	209,645,000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	51,700,000	-	51,700,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	297,390,000	64,505,134	232,884,866	21.69
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,400,000	7,070,000	4,330,000	62.02
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110,900,000	5,170,000	105,730,000	4.66
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	729,172,000	278,967,158	450,204,842	38.26
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	58,090,000	-	58,090,000	-

Tabel. 3.30. Capaian Kinerja Keuangan RO Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi ROD1 Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	800,000,000	119,684,399	680,315,601	14.96

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	800,000,000	119,684,399	680,315,601	14.96
521211	Belanja Bahan	101,139,000	3,080,000	98,059,000	3.05
522141	Belanja Sewa	13,884,000	-	13,884,000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	-	6,000,000	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192,663,000	116,604,399	76,058,601	60.52
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	204,180,000	-	204,180,000	-
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	282,134,000	-	282,134,000	-

Tabel. 3.31. Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Triwulan I Tahun 2024

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
5601 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	1,888,571,000	389,150,554	1,514,323,744	20.61
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	400,000,000	24,749,583	375,250,417	6.19
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	850,000,000	202,242,705	647,757,295	23.79
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	288,571,000	42,912,984	245,658,016	14.87
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	200,000,000	102,145,282	97,854,718	51.07
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Kedaulatan Maritim dan Energi	150,000,000	17,100,000	132,900,000	11.40

RO/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	SISA	%
5601 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	1,888,571,000	389,150,554	1,514,323,744	20.61
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	400,000,000	24,749,583	375,250,417	6.19
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	850,000,000	202,242,705	647,757,295	23.79
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	288,571,000	42,912,984	245,658,016	14.87
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	200,000,000	102,145,282	97,854,718	51.07
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Kedaulatan Maritim dan Energi	150,000,000	17,100,000	132,900,000	11.40

3.6. Analisa Sumber Daya

3.6.1. Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 64 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 56 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 8 orang. Khusus Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan jabatan pada triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.32. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Jabatan pada Triwulan I Tahun 2024

Jabatan	Jumlah Pegawai Pria	Jumlah Pegawai Perempuan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	5	1
Jabatan Fungsional Ahli Madya	7	5
Jabatan Fungsional Ahli Muda	1	4
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	4
Jabatan Pelaksana	12	8
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	7	1
Total	41 Orang	23 Orang

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2024, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.33. dibawah ini.

Tabel 3.32. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2024

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	6
Penata I (III/c)	1
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
Penata Muda (III/a)	14
Total	56 Orang

Sedangkan Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesrasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36. Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan pendidikan terakhir Triwulan I Tahun 2024

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	30
Strata Dua	24
Starata Tiga	1
Total	55 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	7
Total	8 Orang

Adapun usulan kebutuhan jabatan fungsional Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Triwulan I Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Peta Jabatan Di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, dapat dilihat dalam tabel 3.36. dibawah ini.

Tabel 3.36. Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi Tahun 2023

No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
1.	Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	2	• Analis Kebijakan Ahli Madya	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
				• Analis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves (naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020).
2.	Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
3.	Asisten Deputy	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			(selisih 1)
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	

No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
	Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020.
		• Analis Hukum Ahli Pertama	1			
		• Analis Hukum Ahli Pertama	1			
4.	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Diusulkan Ukom sebagai Analis Kebijakan Muda sesuai ND PIh Ses No ND.32/D1.0/KP.06.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1			Diusulkan Ukom sebagai Analis Kebijakan Muda
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves (selisih 1)
5.	Asisten Deputi Energi	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020.
6.	Sekretariat Deputi	• Analis Kebijakan Ahli Utama	1			Apakah tetap mau dipertahankan atau dihapus?


No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
	Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Kebijakan Ahli Muda 	1			1. lulus Ukom sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 5786/K.1/JFT.02.3 tanggal 22 Agustus 2023 ATAU 2. sesuai ND Sesdep Nomor 023.D1.0/HM.02.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Pemberian rekomendasi sebagai AK Muda di Setdep D1
		<ul style="list-style-type: none"> Perencana Ahli Pertama 	1			Usulan melalui ND Deputi 2 kepada Deputi 1 Nomor ND.06.2/D2/KP.09.03/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.
				<ul style="list-style-type: none"> Pranata Komputer Ahli Muda 	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
				<ul style="list-style-type: none"> Analisis Hukum Ahli Pertama 	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
				<ul style="list-style-type: none"> Kasubbag TU 	1	Diusulkan penambahan jabatan pelaksana pada peta jabatan Kemenko Marves

3.6.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep *Activity Based Workplace (ABW)*, yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *workstation/desk* secara khusus, dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif, mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas (Tabel 3.37). Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building, Work-life Balance, Collaborative, Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 3.37. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

4. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
5. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
6. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2024.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 yang akan dihitung pada akhir tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023). Ketiga Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tersebut dibagi dalam 4 Perspektif, yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SS.1 yang memiliki 3 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut: **1) Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan dukungan kegiatan yang**




dilaksanakan untuk mendukung **IKU Pertama** tersebut **Asisten Deputi Energi melaksanakan** sebanyak 9 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan pelaksanaan 2 kegiatan di tunda pada triwulan II tahun 2024; 2). Nilai Kedaulatan Maritim berdasarkan perhitungan dari Nilai Variabel kewilayahan maritim, Variabel Keselamatan Maritim serta Variabel keamanan dan ketahanan maritim. **Nilai Variabel kewilayahan maritim yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan** melalui 8 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 3 kegiatan di tunda pada triwulan II tahun 2024, Untuk Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan 10 Indonesia Melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024, berdasarkan Renaksi harus dijalankan pada triwulan II tapi sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. **Nilai Keselamatan Maritim yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim** melalui 10 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 2 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 tetapi dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024. **Nilai tingkat keamanan dan ketahanan maritim dilaksanakan oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim** melalui 7 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 11 kegiatan ditunda pada triwulan II tahun 2024. 3) **Efektivitas Diplomasi Maritim dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim** melalui 5 kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dan 5 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 tetapi dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024. Khusus Kegiatan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Uzbekistan tidak dilanjutkan, sebab sudah dilakukan identifikasi dan menghasilkan bahwa kerja sama tersebut tidak mendapatkan potensial yang baik bagi Pemerintah Indonesia. Sedangkan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Korea di tunda pelaksanaannya di triwulan III tahun 2024. Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi triwulan I tahun 2024 yang belum dilaksanakan, karena penyelesaian isu isu strategis yang menjadi prioritas Bapak menko. Untuk itu maka direkomendasikan kepada unit eselon II agar merevisi renaksinya sehingga penyelesaian renaksi ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya

Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut: 4) **Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti dengan**



realisasi sebesar 100%, dimana terdiri dari 6 rancangan kebijakan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I Tahun 2024 antara lain; a). Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan beberapa Negara (Inggris dan Amerika Serikat).; b). Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Pertemuan 2nd IORIS Steering Committee Meeting di Colombo, Sri Lanka.; c). Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penyusunan Permenko Marves terkait Pembentukan Tim Koordinasi sesuai Mandat Perpres 80/2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI); d). Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Persiapan Kelanjutan Kontribusi Indonesia untuk AIS Forum dan Koordinasi Kickoff Rencana Kerja Sekretariat AIS Forum Tahun 2024.; e). Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Lanjutan Persiapan Substantif Public-Private Forum Dialog Shipping Related Matters; 2). Koordinasi Identifikasi Potensi Jasa Maritim di Kepulauan Riau; 3). Koordinasi Public-Private Forum Dialog on Shipping Related Matters; 4). Koordinasi Percepatan Perizinan dan Operasi Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPKL) dan PT Layar Nusantara Gas (PTLNG); f). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui kegiatan pendukung, antara lain yaitu 1). Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Migas Dan Hilirisasi Industri Migas; 2). Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR)); 3). Koordinasi penerbitan regulasi dalam rangka penurunan emisi GRK sektor migas; 4). Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 10 Kota..


Sedangkan Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 untuk IKU 5). Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, dengan realisasi sebesar 100%, dimana Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan terdiri dari 3 Isu Strategis yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I Tahun 2024 antara lain; a). Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging



Economies Cooperation/ Global South Collaboration melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Penyusunan Suggested Points of Interventions BMD ke 2 RI Prancis; 2). Koordinasi BMD ke 2 RI Prancis; 3). Koordinasi interkem persiapan FGD UUV; 4). Koordinasi JTC on Mining di Kenya; 5). Koordinasi Task Force Percepatan Kerja Sama Indonesia-Mozambik; **b). Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi** melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Proses Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura tentang FIR, DCA, dan Ekstradisi; 2). Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembiayaan Personel CMAC di SATCC pada K/L terkait; 3). Penyampaian Rekomendasi Penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) Indonesia-Singapura pada Direktur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama Perum, LPPNPI/Airnav.; **c). Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum)** melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah secara umum proses koordinasi antar KL untuk tindak lanjut amanat kepala negara telah disepakati untuk melalui 2 strategi utama yaitu: Penyusunan regulasi nasional yang mencakup roadmap pembentukan AIS Forum sebagai OI sekaligus penguatan tim koordinasi di tingkat nasional Perlu komunikasi formal dengan negara-negara AIS terkait roadmap yang telah coba disusun oleh tim koordinasi nasional melalui technical meeting/SOM/MM.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk **IKU 6) Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi** realisasi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Sosialisasi dan Asistensi SKP Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Finalisasi RB Tematik; 3). Koordinasi Penyusunan Laporan TU Persuratan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Bulan Januari-Maret 2024; 4). Koordinasi Dalam rangka tata tertib administrasi pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah memfasilitasi sosialisasi dan asistensi tata cara pengisian kedua laporan tersebut.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk **IKU 7) Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi** realisasi melalui kegiatan pendukung di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Koordinasi Penyusunan Manual IKU dan Rencana Aksi tahun 2024; 3) Koordinasi Penyusunan



Kerangka Acuan Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024; 4) Koordinasi Perubahan POK Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024; 5) Koordinasi Penyusunan . Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Program dan Kegiatan Tahun 2025.


Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA. 2024 telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP 120.01.1.350494/2024 tanggal 24 November 2023 dimana Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memperoleh alokasi **Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp 46.230.000.000,-** dengan blokir anggaran. Blokir anggaran dilakukan karena rencana kerja tidak dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada TA. 2024 terdapat alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp3.118.540.000,-. **Berdasarkan No: 19/MARVES/SESMENKO/ND/2024 Hal. Penyampaian Distribusi Blokir Automatic Adjustment Kemenko Marves TA 2024.** Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2024 karena mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2024

Capaian Kinerja Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp.3,363,733,520,- (7,80%) dari total Anggaran sebesar Rp.43,111,460,000,-. Tingkat Realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 sebesar 7,80% dikarenakan adanya Perjanjian Pendanaan Pemri untuk AIS Forum (Kontribusi Sukarela Non-reguler) anggaran dalam RO atau Kegiatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar Rp.22.000.000.000

4.2. Kendala


Kendala Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan IKU triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kendala dalam mendukung terlaksananya IKU Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, IKU Persentase Kedaulatan Maritim dan IKU Efektivitas Diplomasi Maritim dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi




triwulan I tahun 2024 yang belum dilaksanakan, karena penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bapak menko.

2. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi triwulan I tahun 2024 adalah Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Uzbekistan tidak dilanjutkan, sebab sudah dilakukan identifikasi dan menghasilkan bahwa kerja sama tersebut tidak mendapatkan potensial yang baik bagi Pemerintah Indonesia. Sedangkan Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan Korea di tunda pelaksanaannya di triwulan III tahun 2024.
3. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Belum terlaksananya Koordinasi untuk memberikan pelatihan operasional API Hub dan Dashboard Analytics bagi operator dan analis K/L terkait (Tahap Pemula); 2). Belum terlaksananya Koordinasi Penyusunan SOP Pemeriksaan Kapal Oleh Tim Teknis;
4. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Belum terlaksananya Koordinasi Kickoff Persiapan Ratifikasi Perjanjian BBNJ oleh Indonesia; 2). Belum terlaksananya Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan National Consultation / Diseminasi Perjanjian BBNK kepada stakeholder nasional;
5. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Kemenko Marves akan sampaikan laporan pemanfaatan secara langsung agar rekomendasi pencairan termin 2 dapat diterbitkan; 2). Pasca rekomendasi terbit, tim akan segera melakukan proses administrasi pencairan dan penyalura anggaran termin 2 sesuai prosedur dan aturan yang berlaku; 3). Perlu arahan deputi terkait dengan rencana antisipasi rencana pencairan termin 3 pada tahun 2025, sehubungan dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian penggunaan APBN Kementerian/Lembaga.;
6. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional di triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Proposal revisi aturan STRAITREP yang diajukan Indonesia memicu para pemangku kepentingan lain mendorong dilakukannya kaji ulang sistem rute dan



telekomunikasi SOMS secara menyeluru 2). Cooperative Mechanism/CM tengah mengkaji secara teknis tiga proposal revisi sistem rute, yakni ekstensi TSS ke sebelah timur, ekstensi TSS ke sebelah barat, dan perubahan sistem rute di Sektor 7;3) Terdapat kesan bahwa industri belum merasa confident dengan prospek keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP. Mereka memandang bahwa sistem telekomunikasi pada TSS di SOMS saat ini sudah berjalan baik dan efisien. Selain itu, kami memperoleh informasi tidak resmi bahwa Malaysia dan Singapura telah memutuskan untuk tidak melepaskan pengelolaan STRAITREP di sektor 5-9..

7. Kendala pelaksanaan Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas di triwulan I tahun 2024 adalah Belum terlaksananya Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas.
8. Kendala pelaksanaan Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Kerja Sama RI-Kenya terkait bidang pertanian memerlukan Kementerian Pertanian mendapatkan IP dari Presiden untuk menyusun RPP revisi PP 4 tahun 2016 (apabila disetujui oleh Presiden) dan Badan Karantina Nasional akan mengajukan IP kepada Presiden melalui Setneg untuk penyusunan PP turunan UU no 21 tahun 2019 pasal 25.; 2). Kerja Sama RI-Zambia, baru menncapai tahap nasional mengenai potensi-potensi yang dapat dieksekusi; 3). Koordinasi dengan BUMN dan Private Sector untuk Persiapan Pertemuan dengan UNHQr.
9. Kendala pelaksaam Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Secara operasional FIR Singapura yang berada di atas ruang udara Indonesia telah dialihkan oleh ICAO menjadi FIR Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024; 2). Adanya 10 orang personil gabungan TNI, AirNav, dan Kementerian Perhubungan RI juga mulai bertugas sebagai personil CMAC di Menara pengawas lalu lintas penerbangan Singapura, sehingga diperlukan penyesuaian lingkungan kerja bagi 10 orang tersebut.
10. Kendala pelaksanaan Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum di triwulan I tahun 2024 adalah 1). dibutuhkan koordinasi yang intens antar K/L terkait untuk percepatan




penyusunan draft regulasi nasional; 2). Perlu adanya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan technical meeting/SOM dan MM tahun 2024..

11. Kendala pelaksanaan IKU Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Adanya usulan kegiatan RB Tematik Tahun 2024 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang akan diinput ke dalam portal RB Tematik RB Nasional pada tanggal 16 Februari 2024. Terdapat 2 (dua) tema Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi dengan 4 (empat) kegiatan RB Tematik; 2). Adanya Penilaian SKP per bulan pada PNS untuk tahun 2024 melalui Aplikasi e-Kinerja BKN;
12. Kendala pelaksanaan IKU Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di triwulan I tahun 2024 adalah 1). Adanya usulan format penyusunan Manual IKU dan Rencana Aksi tahun 2024 yang baru; 2). Adanya pemblokiran anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024.

4.4. Tindak Lanjut


Tindak Lanjut Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan IKU triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut pelaksanaan IKU Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, IKU Persentase Kedaulatan Maritim dan IKU Efektivitas Diplomasi Maritim dikarenakan ada beberapa kegiatan pendukung IKU tidak terlaksana pada triwulan I tahun 2024, maka direkomendasikan kepada unit eselon II agar merevisi reaksinya sehingga penyelesaian reaksi ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
2. Tindak Lanjut pelaksanaan Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi triwulan I tahun 2024 adalah 1). Terkait kerja sama dengan Inggris untuk pelaksanaan Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Korea yang rencana awal akan dilaksanakan pada Triwulan I, atas usulan dari Pemerintah Korea dan kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia akan dijadwalkan ulang pada bulan Juni 2024; 2). Pelaksanaan BMF RI-Inggris yang semula akan dilaksanakan di triwulan IV akan diusulkan untuk dapat dipercepat pelaksanaannya. Hal ini dilakukan mengingat akan adanya Pergantian Presiden atau perlihian pemerintah baru; 3). Kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini




(PNG) terkait ekspor Listrik dari Indonesia ke PNG baru dalam pada tahap kesepakatan harga atau tarif Listrik yang akan diekspor ke PNG; 4). Penyusunan inisiatif dan usulan-usulan Pemerintah Indonesia baru akan dilakukan submisi proposal character building, akan bersamaan dengan penyampaian hasil JTWG kedua dalam sidang IMO-MSC ke-108 pada bulan Mei 2024 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan;

3. Tindak Lanjut pelaksanaan Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi adalah untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Melakukan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan pemeriksaan kerentanan keamanan siber pada platform API Hub; 2) Peningkatan kapasitas personil dalam pengawasan maritim dalam hal ini dalam menganalisis data dan informasi pada API Hub.;
4. Tindak Lanjut pelaksanaan Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Melakukan diseminasi terkait Perjanjian BBNJ kepada seluruh stakeholder di Indonesia. Diseminasi/ Konsultasi Nasional akan dilakukan per regional agar lebih efektif Kegiatan ini diagendakan akan turut mengundang narasumber dari UN DOALOS sebagai pemangku utama; 2). Mengakselerasi pembentukan regulasi nasional sebagai proses ratifikasi BBNJ oleh Indonesia; 3). Menyusun dan Mengakselerasi Pembentukan Peraturan-Peraturan Turunan dari Perpres KDLI yakni: a. Permenko terkait Tim Nasional; b. Peraturan Menteri ESDM; 4). Menyusun dan menyampaikan Proposal Kontrak Eksplorasi yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia kepada ISA. Entitas yang menyampaikan proposal bisa merupakan joint venture antara BUMN/Swasta Nasional dengan Perusahaan Internasional yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas di KDLI.
5. Tindak Lanjut Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Pembentukan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia pada AIS Forum. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan posisi dan peran Indonesia baik dalam diplomasi maritim maupun dalam pengembangan berkelanjutan bagi negara-negara pulau dan kepulauan; 2). Pengesahan dana kontribusi Indonesia untuk AIS Forum sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden dalam HLM AIS Forum tahun 2023; 3). Sebagai bentuk tindak lanjut




Leaders Declaration HLM AIS Forum, Pemerintah Indonesia juga harus mulai segera melakukan berbagai persiapan untuk menyelesaikan mandat yang diberikan, di antaranya, a. Penyelenggaraan Ministerial Meeting ke-6 di Indonesia; b. Kontribusi aktif dan kepemimpinan pada Senior Official Meeting.


6. Tindak Lanjut Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan bahwa keberlanjutan SOMS dalam jangka panjang bergantung pada skema pengelolaan yang adil dan pengelolaan inklusif. Oleh karena itu, CM perlu menyusun roadmap keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan STRAITREP secara bertahap; 2). sebagai tahap pertama, IMO perlu mengumumkan bahwa pengelolaan lalu lintas di perairan di selatan TSS menjadi tanggung jawab VTS Indonesia karena sepenuhnya berada di teritori Indonesia. Untuk mendukung hal ini, CM perlu menyusun SOP serah terima kapal yang berlayar keluar dari batas TSS pada sisi Selatan; 3). Pemerintah Indonesia kiranya dapat mendukung dilakukannya ekstensi TSS di sisi timur dan barat, dengan syarat Indonesia ditetapkan menjadi pengelola telekomunikasi di ujung barat TSS (Sektor 1) dan ujung timur TSS (Sektor 10). Posisi ini kami pandang paling strategis dimana Indonesia akan dapat mengakses informasi seluruh kapal yang melintas masuk dan keluar dari TSS; 4). perlu komitmen finansial pemerintah dalam rangka meningkatkan kesiapan teknis a.l. meningkatkan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di VTS Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menyusun rencana teknis pengembangan, peremajaan, dan upgrading peralatan VTS Batam dan Dumai dengan total rencana anggaran biaya senilai Rp244.901.633.589 (Batam Rp96.005.352.000, Dumai: Rp148.896.281.589); 5). Bila Indonesia mendapatkan tanggung jawab pengelolaan STRAITREP pada Sektor 1 dan 10, akan diperlukan tambahan investasi di luar RAB yang telah disusun.
7. Tindak Lanjut pelaksanaan Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Produksi migas dalam 10 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Hal ini dikarenakan banyak lapangan migas di Indonesia yang sudah mature/tua. Sehingga produksi dari sumur-sumur migas eksisting sulit untuk ditingkatkan dalam mencapai target nasional. Hal yang dapat dilakukan yaitu mencari lapangan-lapangan migas baru dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi,



eksplorasi lapangan migas baru juga dapat menjaga cadangan migas nasional tetap aman dalam jangka panjang. Tantangan yang dihadapi yaitu eksplorasi membutuhkan waktu yang lumayan panjang berkisar 4-6 tahun serta proses menuju produksi awal mencapai 10 tahun. Hal ini diakibatkan panjangnya proses perizinan di kegiatan usaha hulu migas Indonesia selain juga kondisi lapangan migas Indonesia dengan cadangan yang mengarah pada laut dalam. Penyederhanaan proses perizinan dapat membantu percepatan proses menuju tahap produksi lebih awal sehingga target produksi migas nasional dapat segera tercapai. Penyusunan kebijakan seperti Rancangan Peraturan Presiden dapat membantu proses kegiatan usaha hulu migas saat ini dapat disederhanakan dengan koordinasi antar 18 Kementerian/Lembaga yang terlibat menjadi lebih efektif; 2). Proses penyusunan Rancangan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon saat ini tinggal menunggu paraf antar Menteri untuk dapat disahkan di tahun 2024. Peraturan Presiden dalam kegiatan Carbon Capture Storage, menjadi sangat penting karena banyak lembaga finansial di dunia hanya ingin mendanai proyek hulu migas jika sudah ada strategi dekarbonisasi pada rencana proyeknya. Dalam memastikan implementasi kegiatan CCS ini dapat terlaksana, perlu dilakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan alokasi karbon dari dalam negeri dan luar negeri melalui skema cross-border, proses perizinan transportasi dan penyimpanan karbon, dan biaya penyimpanan dari setiap proyek. Pembentukan tim kerja koordinasi akan sangat penting dalam menetapkan peran masing-masing Kementerian/ Lembaga untuk terlaksananya kegiatan Carbon Capture Storage di Indonesia.

8. Tindak Lanjut pelaksanaan Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Identifikasi pelaporan progres update kerja sama Indonesia baik pemerintah maupun sektor bisnis dengan negara-negara selatan; 2). Pengajuan kick off meeting antara Menko Marves dan Menteri Energi Mozambik yang direncanakan pada minggu ke-4 April 2024; 3). Penyampaian finalisasi terhadap draf RPP terkait Pemasukan Hewan dengan Karantina Maksimal; 4). Mendorong dan berkoordinasi implementasi kerja sama PLN dan Esyaso.

- 
9. Tindak Lanjut Kendala pelaksanaan Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Kementerian penjurur masing-masing perjanjian, yakni FIR (Kemhub), DCA (Kemhan), dan ET (Kemenkumham) telah menyatakan persetujuan atas proses pemberlakuan yang berjalan (joint Aeronautical information area Flight Information Region terbaru pasca disepakatinya perjanjian FIR 2022). Selain itu mereka juga telah siap melakukan langkah-langkah strategis implementasi; 2). Kemhan memiliki pekerjaan rumah untuk segera menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan untuk membentuk implementing arrangements (IA) perjanjian DCA. Hal ini harus mencakup berbagai proposal perubahan teknis dikaitkan kondisi terkini area yang akan digunakan untuk latihan militer. IA harus dibicarakan dan disepakati kedua negara melalui Joint Defence Cooperation Committee antara Kemhan RI dan Mindef Singapura.
 10. Tindak Lanjut pelaksanaan Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum) untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Perlu dilaksanakan rapat koordinasi antar K/L terkait secara intens untuk percepatan penyusunan draft regulasi nasional (Perpres) AIS Forum; 2). Perlu arahan Deputi terkait Pertama, Pelibatan K/L kunci di dalam tim kerja nasional, mengingat akan adanya perubahan kabinet pemerintahan di akhir tahun 2024; Kedua, Dorongan administratif penyelenggaraan anggaran tambahan untuk rencana pelaksanaan technical meeting/SOM/MM.
 11. Tindak Lanjut pelaksanaan Presentase Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan menyusun Rencana Aksi dari masing-masing kegiatan RB Tematik 2024 dengan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan RB Tematik per triwulan; 2) Memonitoring dan mengevaluasi penginputan data dan melakukan penilaian SKP dari bulan Januari-Maret 2024 bagi PNS Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui Aplikasi e-Kinerja BKN.
 12. Tindak Lanjut pelaksanaan Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. untuk triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut 1). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan



melakukan koordinasi untuk penilaian capaian kinerja triwulan I tahun 2024 bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Kemenko Marves; 2). Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui Aplikasi e-monev Bappenas bulan Januari-Maret 2024, Laporan TU bulan Januari-Maret 2024, Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bulan Januari-Maret 2024 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi triwulan I tahun 2024.

LAMPIRAN

Data dukung Laporan Kinerja dapat diakses melalui link:

No	Uraian	Penjelasan Untuk Halaman
1	Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Maret 2024	12
2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024	24
3	Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim	25
4	Manual IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024	25
5	Rencana Aksi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024	30
6	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	47
7	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi	49
8	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	50
9	Polcy Memo Rancangan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	54
10	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim dan Energi	57
11	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	61
12	Polcy Memo Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	63
13	Laporan Direktif Pimpinan, Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration	66
14	Laporan Direktif Pimpinan, Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi	70
15	Laporan Direktif Pimpinan, Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut leaders declaration AIS Forum)	73
16	Laporan Presentase Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76
17	Laporan Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80
18	Data Pendukung adanya Blokir Anggaran Untuk Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2024	79 dan 88